
BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses yang multidimensional, yang melibatkan segenap pengorganisasian dan peninjauan kembali atas sistem-sistem ekonomi dan sosial secara keseluruhan. Selain peningkatan pendapatan dan output, proses pembangunan itu juga berkenaan dengan serangkaian perubahan yang bersifat mendasar atas struktur-struktur kelembagaan, sosial, dan administrasi, sikap-sikap masyarakat dan bahkan seringkali juga merambah adat-istiadat, kebiasaan, dan sistem kepercayaan yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan (Todaro, 2000). Akhirnya, meskipun pembangunan itu biasa diartikan dalam konteks nasional, akan tetapi jangkauannya yang sedemikian luas telah memaksa dilakukannya serangkaian modifikasi atau penyesuaian yang bersifat mendasar atas sistem- sistem ekonomi dan sosial internasional.

Kesejahteraan memang tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan ekonomi, bahkan kapasitas ekonomi seringkali ditempatkan sebagai prasyarat utama dalam memajukan taraf hidup manusia. Suatu pertumbuhan memang penting untuk mempertahankan kesejahteraan rakyatnya. Namun pertumbuhan

bukan merupakan akhir dari pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi hanyalah satu alat yang penting.

Pemahaman inilah yang seringkali membuat para perencana pembangunan mengabaikan hakikat dari pembangunan itu sendiri. Akan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi digunakan untuk memperbaiki kapabilitas manusianya, dan pada gilirannya bagaimana rakyat menggunakan kapabilitasnya. Kuncoro (1997) mengartikan kapabilitas sebagai mencakup apa yang dapat maupun tidak dapat dilakukan, misalnya bebas dari kelaparan, dari kekurangan gizi, partisipasi dalam masyarakat, memperoleh tempat tinggal yang memadai, dan sebagainya.

Amartya Sen mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi seharusnya diterjemahkan sebagai suatu proses ekspansi dari kebebasan positif yang dinikmati oleh masyarakat (Paskarina, 2007). Dari perspektif ini, pembangunan baru akan bermakna manakala terjadi peningkatan martabat manusia yang mampu membebaskannya dari belenggu-belenggu kemiskinan dan keterbatasan akses. Inilah yang sesungguhnya menjadi inti dari pembangunan manusia, yakni berfokus pada manusia, untuk memulihkan dan meningkatkan martabat manusia. Di sinilah pembangunan manusia perlu dirancang ulang dengan memadukan antara kebijakan sosial dan kebijakan ekonomi. Kebijakan sosial merupakan media untuk meningkatkan modal sosial dan sumber daya manusia agar mampu berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif.

Keadaan sosial ekonomi yang berbeda dari setiap daerah akan membawa implikasi bahwa cakupan campur tangan pemerintah untuk tiap daerah berbeda pula. Perbedaan tingkat pembangunan antar daerah, mengakibatkan perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah. Gagasan ini timbul setelah melihat kenyataan bahwa, kalau perkembangan ekonomi diserahkan pada kekuatan mekanisme pasar, biasanya cenderung untuk memperbesar dan bukannya memperkecil ketidakmerataan antar daerah, karena kegiatan ekonomi akan menumpuk di tempat- tempat tertentu.

Dalam wacana ilmu ekonomi sendiri akhir-akhir ini telah banyak muncul konsep dan strategi pembangunan ekonomi baru, baik sebagai pelengkap maupun antitesis terhadap konsep ekonomi lama, dengan lebih memasukan aspek-aspek non ekonomi. Tentu saja perkembangan tersebut sangat menggembirakan mengingat adanya kesadaran bahwa proses pembangunan itu sendiri sudah tidak bisa lagi dimobilisasi secara seragam di banyak tempat dan dalam rentang waktu yang sama. Justru konsep pembangunan ke depan harus menyediakan ruang yang memadai bagi terakomodasikannya nilai-nilai lokal, kultur setempat, dan sejarah masyarakat yang bersangkutan.

Kalaupun harus terdapat beberapa hal yang sama dari konsep penyelenggaraan pembangunan tersebut hanyalah pada semangat dan nilai-nilai dasarnya. Artinya, pemaknaan pembangunan lebih diarahkan kepada upaya optimalisasi potensi wilayah berdasarkan kondisi sumberdaya alam, manusia, dan

lingkungan; sedangkan bagaimana pelaksanaannya tergantung dari kreatifitas dan energi masyarakat yang bersangkutan (Yustika, 2002).

Kendala yang dihadapi masyarakat adalah keterbatasan sarana dan prasarana desa, sumberdaya manusia, dan belum dimaksimalkan sumber daya alam yang tersedia secara optimal, misalnya dalam pengembangan potensi sumberdaya laut (sarana tangkapan ikan sebagai komoditi unggulan, tangkapan hasil kelautan masih terbatas karena sarana dan prasarana yang terbatas dan cara-cara tradisonal yang digunakan sehingga menghambat peningkatan pendapatan masyarakat. Sementara disektor pertanian misalnya bantuan perlatan-peralatan kebutuhan masyarakat sering tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, umpamanya tempat pengeringan kelapa (kompur kelapa) yang dibangun oleh pemerintah bertolak belakang dengan kebiasaan masyarakat di desa. Permasalahan tersebut menyebabkan masyarakat di Kabupaten Halmahera Barat sulit untuk keluar dari situasi keterbelakangan.

Tujuan Kegiatan

Sesuai dengan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka kegiatan survei ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis bagaimana tingkat kemiskinan penduduk serta faktor-faktor penyebab kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Halmahera Barat.

2. Menganalisis tingkat pengangguran serta gejala atau faktor-faktor penyebab terjadinya pengangguran di Kabupaten Halmahera Barat.
3. Menganalisis tingkat ketimpangan sosial masyarakat di Kabupaten Halmahera Barat.
4. Menghasilkan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran serta ketimpangan sosial dalam masyarakat di Kabupaten Halmahera Barat.

Manfaat Kegiatan

Adapun manfaat yang dapat diambil dari hasil survei ini yaitu:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, serta ketimpangan sosial, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang lebih berkualitas.
2. Bagi para stakeholders, diharapkan dapat memberikan informasi tambahan terkait masalah sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Halmahera Barat, khususnya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial, sehingga dapat digunakan sebagai referensi dalam rangka memberikan rekomendasi

kebijakan kepada pemerintah daerah.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Kemiskinan

Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Misalnya, ada pendapat yang mengatakan bahwa kemiskinan terkait dengan sikap, budaya hidup, dan lingkungan dalam suatu masyarakat atau yang mengatakan bahwa kemiskinan merupakan ketidakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintahan sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksplorasi (kemiskinan struktural). Tetapi pada umumnya, ketika orang berbicara tentang kemiskinan, yang dimaksud adalah kemiskinan material. Dengan pengertian ini, maka seseorang masuk dalam kategori miskin apabila tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan pokok untuk dapat hidup secara layak. Ini yang sering disebut dengan kemiskinan konsumsi. Memang definisi ini sangat bermanfaat untuk mempermudah membuat indikator orang miskin, tetapi definisi ini sangat kurang memadai karena; (1) tidak cukup untuk memahami realitas kemiskinan; (2) dapat menjerumuskan ke kesimpulan yang salah bahwa menanggulangi kemiskinan cukup hanya dengan

Menyediakan bahan makanan yang memadai; (3) tidak bermanfaat bagi pengambil keputusan ketika harus merumuskan kebijakan lintas sektor, bahkan bisa kontraproduktif (Sahdan, 2007).

Tinggi-rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara tergantung pada dua faktor utama, yakni: (1) tingkat pendapatan nasional rata-rata, dan (2) lebar-sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Jelas, bahwa setinggi apa pun tingkat pendapatan nasional per kapita yang dicapai oleh suatu negara, selama distribusi pendapatan yang tidak merata, maka tingkat kemiskinan di negara tersebut pasti akan tetap parah. Demikian pula sebaliknya, seberapa rata pun distribusi pendapatan di suatu negara, jika tingkat pendapatan nasional rata-ratanya tidak mengalami perbaikan, maka kemelaratan juga akan semakin meluas.

Kemiskinan dapat digolongkan dalam kemiskinan struktural, kemiskinan kultural dan kemiskinan natural. Kemiskinan struktural disebabkan oleh kondisi struktur perekonomian yang timpang dalam masyarakat, baik karena kebijakan ekonomi pemerintah, penguasaan faktor-faktor produksi oleh segelintir orang, monopoli, kolusi antara pengusaha dan pejabat dan lain-lainnya. Intinya kemiskinan struktural ini terjadi karena faktor-faktor buatan manusia. Adapun kemiskinan kultural muncul karena faktor budaya atau mental masyarakat yang mendorong orang hidup miskin, seperti perilaku malas

bekerja, rendahnya kreativitas dan tidak ada keinginan hidup

lebih maju. Sedangkan kemiskinan natural adalah kemiskinan yang terjadi secara alami, antara lain yang disebabkan oleh faktor rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam (Muttaqin, 2007).

Realisme Kemiskinan: Gejala, Konteks, dan Faktor

Sebagai bagian dari realitas sosial, kemiskinan merupakan juga suatu kondisi yang berproses dan seringkali ditemukan adanya keterkaitan antara gejala, konteks, dan faktor penyebab (Saragih, 2007).

1. Mencermati Gejala

Kualitas hidup seseorang atau komunitas tertentu, secara langsung dapat dilihat melalui tampilan fisik atau kondisi yang dialami, seperti tingkat pendapatan, pendidikan, kondisi kesehatan, tingkat kematian, kondisi fisik permukiman, kualitas sanitasi, dan sebagainya. Gejala kualitas hidup yang buruk tidak serta merta mengindikasikan adanya ketidakmampuan ekonomi atau kemiskinan, meskipun kemiskinan dengan sendirinya akan menyebabkan munculnya gejala kualitas hidup yang buruk. Tingkat kematian bayi yang meningkat akibat terjadi tingginya konsumsi rokok oleh ibu hamil tentu berbeda maknanya dengan meningkatnya angka kematian akibat ketidakmampuan membiayai kebutuhan pangan. Berbagai kondisi yang terkait dengan kualitas hidup yang buruk tersebut dalam tulisan dinyatakan sebagai gejala. Berbagai upaya untuk mendeskripsikan

ini

dinyatakan sebagai gejala. Berbagai upaya untuk mendeskripsikan

gejala tersebut dalam bentuk indikator telah dilakukan oleh banyak pihak yang berkepentingan dan dikaitkan langsung dengan fungsi pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah, seperti indeks mutu hidup, indeks pembangunan manusia, dan lain sebagainya. Para pengambil kebijakan telah menjadi sangat berkepentingan akan ketersediaan informasi yang akurat mengenai perkembangan berbagai indikator tersebut sebagai sinyal awal untuk pengambilan keputusan dan mengukur keberhasilan dalam penyelenggaraan negara.

2. Memahami Konteks

Meskipun gejala yang ditampakkan sama, kemiskinan kerap kali terjadi untuk konteks yang berbeda. Konteks penting dipahami karena akan mempengaruhi efektifitas suatu kebijakan yang akan dijalankan untuk tujuan mengatasi kemiskinan. Memahami konteks, paling tidak menyangkut deskripsi atas dua pertanyaan: yakni siapa dan di mana. Siapa, merupakan penjelasan atas posisi seseorang atau kelompok yang kehilangan kemampuan ekonomi dalam suatu struktur produksi atau struktur sosial-politik yang memiliki relevansi dengan kondisi yang dialami (misal: petani migran berlahan kecil, buruh berstatus kepala keluarga). Di mana, merupakan deskripsi geografis atau satuan lokasi tertentu yang memiliki relevansi dengan kondisi yang dialami (misal: di seputar kawasan hutan produksi, di kawasan industri). Kesatuan siapa dan di mana akan

Memperjelaskan deskripsi konteks (misal petani migran berlahan

kecil di seputar hutan produksi, buruh berstatus kepala keluarga di kawasan industri). Konteks merupakan dasar untuk melakukan penelusuran berbagai faktor yang mempengaruhi (penyebab) terjadinya kemiskinan tersebut.

Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Friedmann (1992) kemiskinan disebabkan karena tidak adanya pemberdayaan, dan perlunya solusi tentang 8 (delapan) dasar kekuatan sosial sebagai sarana dasar yang tersedia dalam ekonomi keluarga untuk keberlangsungan hidupnya, yaitu:

- a. Pertahanan ruang hidup (*defensible life space*). Sebagai dasar wilayah ekonomi keluarga, pertahanan hidup mencakup ruang fisik, di mana anggota keluarga memasak, makan, tidur dan jaminan perlindungan terhadap barang milik pribadi. Dalam pengertian lebih luas disebut rumah yang disosialisasikan serta dukungan aktivitas hidup lainnya yang membutuhkan tempat.
- b. Waktu luang (*Surplus Time*). Waktu yang terdapat pada keluarga ekonomi mampu dan merupakan waktu diatas waktu yang diperluakan untuk menambah nafkah pekerjaan.
- c. Pengetahuan dan ketrampilan (*knowledge and skill*). Tingkat pendidikan dan penguasaan ketrampilan khusus dalam ekonomi sangat menguntungkan untuk mempertinggi prospek jangka panjang ekonomi keluarga.

- d. Informasi yang tepat (*appropriate information*). Informasi yang akurat dan rasional berhubungan dengan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup.
- e. Organisasi sosial (*social organization*). Termasuk organisasi formal dan informal yang berasal dari keluarga.
- f. Jaringan Sosial (*social networks*). Keluarga merupakan jaringan horisontal yang luas (keluarga, teman, tetangga) jaringan kerja vertikal ini melewati tingkat sosial untuk memperbaiki adanya perubahan keluarga dengan kekuatan tetapi ada ketergantungan hubungan *patron client*.
- g. Sarana dalam pekerjaan dan lingkungan keluarga (*instrumen of work and livelihood*). Sebagai alat produksi keluarga, semangat yang kuat untuk produksi pedesaan.
- h. Sumber keuangan (*financial resources*). Jaringan pendapatan keluarga baik secara formal dan informal melalui kredit.

Faktor atau penyebab adalah suatu kondisi yang secara mendasar menyebabkan terjadinya proses pemiskinan pada suatu konteks tertentu. Sebagai contoh: angka kematian bayi yang tinggi di kawasan seputar hutan produksi, dialami oleh keluarga petani berlahan kecil terkait dengan ketiadaan sarana atau prasarana kesehatan. Ketiadaan prasarana diakibatkan karena pemerintah tidak bisa membangun poliklinik desa di kawasan tersebut. Ini terjadi karena lahan yang digarap berstatus sengketa. Hal lain, karena status lahan sengketa, warga tak dapat memiliki KTP, syarat untuk mengakses

jaminan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah daerah
walaupun jaminan

kesehatan dapat digunakan untuk mengakses bidang yang menjalankan praktik swasta di desa dekat kawasan. Contoh lain dalam menelusuri penyebab berdasarkan konteks diatas adalah tingginya angka putus sekolah di keluarga buruh migran di suatu daerah misalnya pada kawasan tekstil. Kondisi ini meningkat sejak terjadi kenaikan biaya transportasi hampir dua kali lipat pada saat terjadi pencabutan subsidi BBM. Biaya transportasi yang meningkat telah menyebabkan buruh mengorbankan sekolah anaknya. Ini terjadi karena tidak ada regulasi yang mengatur keharusan penyediaan perumahan bagi buruh di kawasan industri dengan akses terjangkau.

Secara umum, faktor penyebab dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni faktor struktural dan nonstruktural. Faktor struktural termasuk diantaranya akses terhadap keputusan publik, pelayanan publik, struktur politik, struktur pasar, globalisasi, dan lain sebagainya. Adapun yang termasuk faktor nonstruktural di antaranya adalah: nilai-nilai atau keyakinan tertentu, pengalaman psikologis, bencana alam, kondisi geografis, dsb. Meskipun berbeda, kedua faktor tersebut tidaklah terlepas satu sama lain (*mutually exclusive*) saling mempengaruhi. Nilai-nilai atau keyakinan akan mempengaruhi dominasi arah keputusan publik yang mungkin akan menyebabkan kelompok masyarakat tersebut termarginalisasi secara ekonomis. Begitu juga sebaliknya, persaingan global telah menyebabkan

sedemikian rupa tekanan terhadap nilai-nilai lokal dan perubahan ke arah sikap hidup yang cenderung individualistis. Jaminan sosial

Berbasis keluarga atau kerabat hilang dan komunitas berpenghasilan rendah menjadi sangat rentan secara ekonomis. Sumodiningr (1997) berpendapat bahwa kemiskinan timbul karena ada sebagian daerah yang belum sepenuhnya tertangani, ada sebagian sektor yang harus menumpang tenaga kerja secara berlebih dengan tingkat produktivitas yang rendah, dan ada pula sebagian masyarakat yang belum ikut serta dalam proses pembangunan sehingga belum dapat menikmati hasilnya secara memadai.

Menurut Mas'ood (1994), penyebab kemiskinan struktural menyangkut beberapa hal, yaitu: (i) *policy bias*, di mana kebijakan pemerintah cenderung mengutamakan kota, mengistimewakan komoditi ekspor serta kebijakan pangan yang mengistimewakan bahan makanan impor; (ii) *proses-proses kelembagaan*, seperti kelangkaan akses tanah dan pengairan, pengaturan bagi hasil dan sewa menyewa tanah yang timpang, pasar yang kurang berkembang dan kelangkaan kredit serta kurangnya fasilitas pelatihan; (iii) *dualisme ekonomi*, pengambilan sumber daya yang besar untuk mengembangkan pertanian komersial dan berorientasi ekspor, sementara petani kecil dan pinggiran tidak punya kesempatan berkembang; (iv) *tekanan kependudukan*; (v) *manajemen sumberdaya alam dan lingkungan*, yang sangat berkaitan dengan kelangkaan sumberdaya alam; (vi) *siklus dan proses alamiah*, berupa kelangkaan pangan yang bersifat musiman

sehingga kaum miskin di pedesaan segera menjual hasil pertaniannya
meski dengan harga yang murah demi memenuhi

kebutuhan jangka pendek dan membeli bahan-bahan pertanian kembali dengan harga yang lebih tinggi; (vii) *marjinalisasi wanita*, adanya diskriminasi wanita sehingga mereka sulit mendapatkan akses input; (viii) *tengkulak yang eksploitatif*, seperti pemilik terhadap penggarap, pelepas uang terhadap peminjam, pedagang terhadap petani kecil, dan lain-lain; (ix) *fragmentasi politik internal dan gejolak sosial*, misalnya kemiskinan di Timor Timur yang berkepanjangan akibat dari kericuhan daerah.; serta (x) *proses internasional*, di mana kemiskinan terjadi di negara yang penghasilannya tergantung pada pasar internasional.

Oleh karena itu, konsep kemiskinan yang diungkapkan oleh Chamber (1988) cukup relevan. Chamber mengemukakan bahwa inti dari masalah kemiskinan terletak pada apa yang disebut dengan *deprivatization trap* atau perangkap kemiskinan yang mempunyai 5 (lima) unsur, yaitu: (i) *kemiskinan itu sendiri*; (ii) *kelemahan fisik*; (iii) *keterasingan/kadar isolasi*; (iv) *kerentanan/kerawanan*; (v) *ketidakberdayaan*. Kelima unsur tersebut saling berkaitan dalam suatu jalinan interaksi timbal balik sehingga perangkap kemiskinan benar-benar mematikan peluang hidup masyarakat atau keluarga miskin.

Pandangan yang sangat luas tentang kemiskinan yang diderita seseorang atau sekelompok orang adalah sebagai manusia

yang sedang menerima cobaan. Bersamaan dengan itu, dikatakan juga bahwa kemiskinan terjadi pada seseorang atau sekelompok orang karena sedang menerima pembalasan dari dosa-dosa yang telah diperbuat atau paling tidak atas

kecerobohan yang pernah dilakukan (atas kriteria moralitas). Pandangan ini lazimnya bertolak dari suatu keyakinan religi. Tetapi kenyataan-kenyataan yang dihadapi pada akhir decade 1890-an misalnya, dengan terjadi krisis ekonomi yang dahsyat dikecerobohan yang pernah dilakukan (atas kriteria moralitas). Pandangan ini lazimnya bertolak dari suatu keyakinan religi. Tetapi kenyataan-kenyataan yang dihadapi pada akhir dekade 1890-an misalnya, dengan terjadi krisis ekonomi yang dahsyat di

Amerika Serikat, puluhan juta orang menganggur, sumber-sumber pendapatan hilang, dan puluhan juta orang pula tidak mampu memenuhi kebutuhannya, maka pikiran-pikiran yang doktriner itu mulai dipertanyakan (Schiller, 1973).

Setelah masa *recovery* terlampaui dan masa *prosperity* dicapai kembali dengan meningkatnya kehidupan kelas menengah, maka orang mulai pula melupakan kemiskinan. Kondisi yang hampir sama muncul lagi pada resesi besar tahun 1930-an. Dengan demikian, kepercayaan bahwa kemiskinan sebagai refleksi dosa dari perilaku manusia, telah diimbangi dengan keyakinan bahwa upaya manusia yang lebih keras harus dilakukan.

Teori Pengangguran

Pengangguran merupakan masalah ekonomi makro yang berpengaruh langsung bagi standar kehidupan dan tekanan psikologis masyarakat. Banyak politisi menggunakan ***indeks kesengsaraan (misery index)***, yang merupakan penjumlahan dari inflasi dan tingkat pengangguran, untuk menghitung sehat tidaknya perekonomian serta kesuksesan atau kegagalan dari kebijaksanaan ekonomi (Mankiw, 2003). Tingkat pengangguran menunjukkan persentase jumlah orang yang ingin bekerja tetapi

belum memperoleh pekerjaan. Hal ini berarti bahwa jika dalam suatu negara/ daerah yang memiliki angkatan kerja yang terus mengalami kenaikan, tetapi tidak terserap dalam lapangan pekerjaan berarti bahwa telah terjadi kenaikan angka pengangguran.

Salah satu alasan terjadinya pengangguran adalah diperlukannya waktu untuk mencocokkan tenaga kerja yang tersedia dengan pekerjaan yang sesuai. Dalam kenyataan, tenaga kerja mempunyai pilihan dan kemampuan yang berbeda, disamping itu pekerjaan yang berbeda membutuhkan keahlian yang berbeda. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah arus informasi mengenai lowongan pekerjaan dan kesempatan kerja tidak sempurna. Keadaan tersebut ditunjang dengan mobilitas geografis dari pekerja yang tidak bisa sesegera mungkin. Dengan demikian untuk mencari pekerjaan yang tepat akan membutuhkan waktu dan usaha. Pengangguran yang disebabkan oleh karena waktu yang dibutuhkan oleh para pekerja untuk mencari kerja disebut ***frictional unemployment*** (Herlambang, dkk, 2001).

Keadaan angkatan kerja suatu masyarakat secara umum dapat menggambarkan kehidupan sosial masyarakat tersebut. Dari data angkatan kerja dan kesempatan kerja akan terlihat seberapa besar partisipasi dalam angkatan kerja dan tingkat kesempatan kerja yang ideal, sehingga peningkatan jumlah angkatan kerja selaras dengan peningkatan kesempatan kerja,

implikasinya adalah tingkat pengangguran dapat ditekan sekecil mungkin (Syaukani, 2003:65). Sejalan dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, jumlah angkatan kerjapun senantiasa meningkat dari tahun ke tahun, oleh karena itu pemerintah harus membangun kembali kesempatan kerja dengan mempersiapkan seluruh masyarakatnya dengan memberi perhatian, keterampilan dan kapasitas untuk memberi kontribusi kepada pekerjaan dan pelayanan masyarakat. Angkatan kerja meningkat di setiap sektor, termasuk sektor primer (pertanian dalam arti luas). Peningkatan tenaga kerja sektor tersier dan peningkatan produktifitas dengan beberapa standar memberikan rangsangan bagi perekonomian (Anwar, 1992 :32).

Menurut Latif (1994 : 21) pembangunan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja dapat didesain di beberapa lokasi untuk memecahkan masalah ekonomi. Dengan mencoba mengerti fenomena dan konsekwensinya kepada daerah merupakan langkah pertama yang dapat diambil. Para pimpinan daerah dapat mengidentifikasi situasi yang dihadapi oleh daerah dalam konteks yang lebih luas. Oleh karenanya, kebijakan nasional yang efektif akan membantu dalam formasi dasar penciptaan keseimbangan antara kepentingan pemerintah pusat dan daerah terutama dalam kaitannya dengan penciptaan kesempatan kerja.

Pentingnya suatu daerah untuk meningkatkan angkatan kerja

dengan membentuk suatu penciptaan kesempatan kerja dan pelatihan.
Kebijakan yang cenderung sering terjadi hanya melatih

manusianya, tetapi pekerjaan untuk menampung orang tersebut tidak ada. Perlu ada kecocokan antara angkatan kerja yang dilatih dan jumlah kesempatan kerja yang ada. Kebijakan ini lebih menekankan pada pembangunan keterampilan di daerah dan membangun kembali masyarakat (Tjiptoherijanto, 2000 : 33).

Parkin dan Bade (1992: 238) melihat besarnya permintaan tenaga kerja dapat ditunjukkan oleh jumlah orang yang bekerja pada suatu saat. Dengan demikian, jumlah orang yang bekerja merupakan kesempatan kerja. Kesempatan kerja berubah dari waktu ke waktu namun sebenarnya penyebab perubahannya bukan karena waktu saja. Adapun penyebab sesungguhnya terletak pada bidang ekonomi. Perubahan yang terlihat pada situasi ekonomi membawa dampak pada kesempatan kerja. Hal ini juga merupakan konsekuensi logis dari konsep permintaan sebagai permintaan turunan, permintaan tidak asli atau permintaan tidak langsung. Dengan kata lain besarnya kesempatan kerja peka terhadap perubahan ekonomi.

Untuk mengurangi pengangguran harus diciptakan kesempatan kerja sesuai dengan pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi dengan tetap memberikan kesempatan pada peningkatan produktifitas (Lukisari, 2003: 11-15). Dalam kajian ini, konsep kesempatan kerja yang dirujuk adalah kesempatan kerja menurut lapangan usaha atau sektor ekonomi. Dengan demikian perluasan kesempatan kerja dilihat dari

pertambahan kesempatan kerja yang terjadi pada masing-masing sektor ekonomi setiap tahunnya. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah

geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap (Statistik Indonesia). Penduduk usia kerja adalah yang berumur sepuluh tahun keatas.

Dengan demikian atas dasar uraian diatas yang perlu mendapat perhatian serius adalah dengan kecenderungan meningkatnya tingkat pengangguran, diharapkan adanya penciptaan lapangan kerja (KK) baru yang mampu menyerap tenaga kerja (padat karya). Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK menunjukkan rasio penduduk usia kerja yang telah siap terjun ke dunia kerja (membutuhkan pekerjaan), baik yang sudah mendapatkan pekerjaan maupun yang belum. TPAK dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$TPAK = \frac{AK}{pddk\text{usia kerja}} \times 100\% \dots\dots\dots (2.2)$$

Tingkat pengangguran merupakan persentase penduduk angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Tingkat pengangguran menunjukkan rasio penduduk usia kerja yang siap terjun ke dunia kerja (membutuhkan pekerjaan), tetapi belum mendapatkan pekerjaan.

Tingkat pengangguran dihitung dengan rumus sebagai berikut (BPS, 1993 : 4 – 6) :

$$\text{Tingkat pengangguran} = \frac{\Sigma \text{pengangguran}}{AK} \times 100\% \dots\dots\dots (2.3)$$

Ketimpangan Sosial

Ketimpangan sosial dalam masyarakat merupakan suatu gejala sosial yang timbul akibat dari perbedaan sikap dan mental serta akses terhadap berbagai kebijakan atau pelayanan dari pemerintah. Indikator sosial yang sering digunakan dalam mengukur ketimpangan sosial dalam masyarakat adalah dengan menghitung indeks pembangunan manusia (*Human Life Index*).

Konsep pembangunan manusia (*people centered development*) bukan hal yang baru dalam wacana konsep maupun praktik pembangunan. Konsep tersebut muncul sebagai reaksi terhadap kegagalan model pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan secara merata tidak terwujud. Kesadaran bahwa pembangunan seyogianya menjadi sarana untuk mengentaskan kemiskinan telah melahirkan model pembangunan yang bertumpu pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yakni pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar.

Modal manusia yang berkualitas akan memastikan kelangsungan pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Pertumbuhan yang tinggi akan meningkatkan pendapatan penduduk dan seterusnya taraf hidup; akhirnya menjamin keselamatan sosial masyarakat, meningkatkan tahap kesehatan,

keharmonisan serta kesejahteraan yang berkelanjutan yang akan dapat melangsungkan pertumbuhan ekonomi (Abu Bakar & Ali, 2004). Kondisi modal manusia di negara miskin dan berkembang semakin parah dengan adanya pengaruh globalisasi ekonomi yang tidak terkendali. Hal ini disebabkan karena peluang (*oppurtunity*) globalisasi ekonomi hanya bisa ditangkap oleh mereka yang memiliki kemampuan dan knowledge yang baik. Rendahnya kualitas modal manusia di hampir sebagian negara miskin dan berkembang menyebabkan mereka sangat rentan terhadap perubahan globalisasi yang cepat, sehingga akhirnya larut dan dirugikan dalam proses didalamnya (Satria, 2008).

Kebijakan pembangunan yang tidak mendorong peningkatan kualitas manusia masing-masing daerah hanya akan membuat daerah yang bersangkutan tertinggal dari daerah yang lain, termasuk dalam hal kinerja ekonominya. Dengan kata lain, peningkatan kualitas modal manusia juga akan memberikan manfaat dalam mengurangi ketimpangan antardaerah. Ramirez dkk, 1998 (dalam Srait, 2007) menyebutkan bahwa ada hubungan timbal balik (*two-way relationship*) antara human capital dan pertumbuhan ekonomi dan itu sudah diterima secara luas namun faktor-faktor spesifik yang menghubungkannya masih kurang dieksplorasi secara sistematis.

Strategi pembangunan di sebagian besar negara memprioritaskan pada pembangunan kualitas modal manusia dengan melakukan perbaikan sistem pendidikan dan support anggaran (subsidi) yang besar. Selain itu pembangunan modal manusia diyakini tidak hanya dapat meningkatkan produktivitas

dan bertumbuh, namun juga berperan sentral mempengaruhi distribusi pendapatan di suatu perekonomian (Becker, 1964; Schultz, 1981 dalam Heckman, 2005). Romer, 1986; Lucas, 1988 (dalam Cui et.,al. 2008) Menjelaskan bahwa modal manusia tidak hanya diidentifikasi sebagai kontributor kunci dalam pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan, namun juga mendorong tujuan pembangunan untuk meningkatkan *human freedom* secara umum. Selain itu, fokus perkembangan global saat ini yang dicatat dalam *millennium development goals* juga telah memposisikan perbaikan kualitas modal manusia dalam prioritas yang utama.

Keuntungan dari modal manusia tentu memiliki pengaruh yang luas dalam perekonomian, khususnya bagaimana kontribusi modal manusia dalam mendorong produktivitas, serta mengembangkan adaptability dan efisiensi alokasi. Pertumbuhan ekonomi tidak semata mata ditentukan oleh akumulasi investasi kapital tetapi tidak kalah pentingnya juga investasi manusia. Investasi kapital dan investasi manusia relevan sebagai faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi (Alfranca, et. al. 2001).

Selain itu pembangunan modal manusia diyakini tidak hanya dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan, namun juga berperan sentral mempengaruhi distribusi pendapatan di suatu perekonomian. (Becker, 1964; Schultz, 1981 dalam Heckman, 2005). Logika ini jugalah yang mendorong strategi pengentasan

Kemiskinan yang bersentral pada penting pembangunan modal manusia (*human capital*).

Kegiatan ekonomi disebabkan oleh peningkatan modal manusia dan/ atau kemampuan inovasi lebih besar sebagai dua faktor yang saling berhubungan cenderung untuk merangsang kemampuan inovasi dari suatu ekonomi (Teixeira, et al. ,2003). Kontribusi akumulasi modal manusia dalam pertumbuhan semakin penting. Sumber perbedaan yang utama di dalam standar hidup antara negara–negara adalah perbedaan dalam modal manusia (Dahlin, 2002). *Human capital* mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap GDP. Keunggulan mutu modal manusia lebih menjelaskan pertumbuhan ekonomi (Andreosso, et al. 2002).

Secara konvensional, pembangunan sumber daya manusia diartikan sebagai investasi *human capital* yang harus dilakukan sejalan dengan investasi *physical capital*. Cakupan pembangunan sumber daya manusia ini meliputi pendidikan dan latihan, kesehatan, gizi, penurunan fertilitas, dan pengembangan enterprenurial yang kesemuanya bermuara pada peningkatan produktivitas manusia. Karenanya, indikator kinerja pembangunan sumber daya manusia mencakup indikator- indikator pendidikan, kesehatan, gizi, dan sebagainya (Tjokrowinoto, 1996).

Pembangunan sumber daya manusia ditempuh melalui upaya pendidikan, berarti human investment bersama-sama dengan *non human investment* dilakukan secara bergandengan

Untuk mencapai suatu pertumbuhan ekonomi yang lestari. Hasil temuan menunjukkan adanya dampak investasi manusia dan atau investasi capital terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi kapital dan investasi manusia relevan sebagai faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi (Alfranca, et al. 2001).

BAB III

METODE SURVEI

Metode Kajian

Kajian ini merupakan kombinasi antara kajian kualitatif (*qualitative research*) dan kajian deskriptif (*descriptive research*). Kajian kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data-data deskriptif, yang meliputi kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang memahami objek kajian yang sedang dilakukan yang dapat didukung dengan studi literatur berdasarkan pendalaman kajian pustaka, baik berupa data kajian maupun angka yang dapat dipahami dengan baik. Menurut Kirk dan Miller (2002; dalam Moleong, 2006), kajian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Kajian deskriptif memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang gejala-gejala sosial tertentu atau aspek kehidupan tertentu pada objek yang diteliti. Pendekatan tersebut dapat mengungkapkan secara hidup kaitan antara berbagai gejala sosial, dimana hal tersebut tidak dapat dicapai oleh kajian yang bersifat menerangkan (Mantra, 2004:34).

Sumber Data

Dalam kajian empirik, sampling diartikan sebagai proses pemilihan atau penentuan sampel. Secara konvensional, konsep sampel menunjuk pada bagian dari populasi (*universum*). Sampling dilakukan bukan tanpa tujuan, artinya peneliti/ surveyor melakukan sampling karena maksud tertentu.

Berkaitan dengan representasi populasi, maka penentuan jumlah sampel (*sample size*) menjadi sedemikian penting. Dalam hal ini, ada empat faktor yang perlu diperhatikan (Bungin, 2003:52): (a) derajat homogenitas populasi, makin homogen, semakin kecil jumlah sampel, demikian sebaliknya, (b) presisi yang dikehendaki peneliti, makin tinggi presisi, semakin besar jumlah sampel, (c) rencana analisis, dan (d) jumlah tenaga, biaya dan waktu yang tersedia.

Berkenaan dengan tujuan kajian kualitatif di atas, maka dalam prosedur sampling yang terpenting adalah bagaimana menentukan informan kunci (*key informan*) atau *situasi sosial* tertentu yang sarat informasi sesuai dengan fokus kajian. Untuk memilih sampel (dalam hal ini informan kunci atau situasi sosial) lebih tepat dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*). Selanjutnya, bilamana dalam proses pengumpulan data sudah tidak lagi ditemukan variasi informasi, maka surveyor tidak perlu lagi untuk mencari informasi baru, proses pengumpulan informasi dianggap sudah selesai.

Pengumpulan Data

Kajian ini menggunakan dua sumber data. *Pertama*, data primer yang diperoleh melalui kajian empiris pada beberapa rumah tangga miskin dan institusi atau Pemerintah Daerah setempat yang diberi tanggung jawab untuk menangani permasalahan rumah tangga miskin, Data ini diperoleh dengan beberapa cara, seperti penggunaan wawancara mendalam (*in- depth interview*, melalui *key persons*) dan investigasi. Data primer juga dapat diperoleh lewat metode observasi. *Kedua*, data sekunder (studi dokumen) yang berasal dari departemen pemerintah (khususnya berkenaan dengan kebijakan pemerintah), lembaga riset, data dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan lain-lain. Dari kedua sumber data tersebut diperoleh data yang lebih lengkap.

Metode Analisis

Kajian ini menggunakan metode deskriptif dan metode kualitatif sebagai alat analisis. Kajian deskriptif dimaksudkan sebagai jenis kajian yang menjelaskan tentang gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat secara makro, seperti tingkat kemiskinan penduduk perkotaan dan perdesaan, tingkat pengangguran, serta ketimpangan sosial yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sementara, kajian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis kajian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.

Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena yang sedikit pun belum diketahui. Metode ini dapat juga digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui. Demikian pula metode kualitatif dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif (Strauss dan Corbin, 2003:4-5).

BAB IV

KONDISI MAKRO KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Perkembangan Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2007-2009 mengalami peningkatan yang cukup besar pada table 4.1 jumlah penduduk laki-laki sebanyak 54.071 jiwa kemudian mengalami peningkatan pada pertambahan jumlah perempuan sebanyak 51.039 jiwa dan total jumlah penduduk sebanyak 105.110 pada tahun 2007. Perkembangan jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Pada tahun 2008 jumlah pertambahan penduduk laki-laki sebanyak 54.822 dan pertambahan jumlah perempuan sebanyak 51.747 sehingga total sebanyak 106.569 jiwa.

Peningkatan jumlah penduduk pada tahun 2009 jumlah penduduk bertambah sebesar 55.827 bagi laki-laki, dan pertambahan jumlah penduduk bagi perempuan sebanyak 54.317 sehingga total jumlah penduduk sebanyak 110.144 jiwa di Kabupaten Halmahera Barat.

Tabel 4.1. Perkembangan jumlah Penduduk

di Kabupaten Halmahera Barat Menurut Jenis Kelamin

Kecamatan <i>District</i>	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1. Jailolo	13.246	13.130	26.376	
2. Jailolo Timur	3.051	2.853	5.904	
3. Jailolo Selatan	8.622	7.869	16.491	
4. Sahu	4.944	4.852	9.796	
5. Sahu Timur	4.071	3.931	8.002	
6. Ibu	4.924	5.120	10.044	
7. Ibu Selatan	5.996	6.177	12.173	
8. Ibu Utara	4.142	3.954	8.096	
9. Loloda	6.831	6.431	13.262	
Jumlah	2009	55.827	54.317	110.144
	2008	54.822	51.747	106.569
	2007	54.071	51.039	105.110

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Barat , 2009

Perkembangan jumlah penduduk seluruhnya sejak tahun 2007 hingga tahun 2009 dapat dilihat juga melalui grafik di bawah ini.



Gambar 4.1. Jumlah Penduduk perkecamatan di Kabupaten Halmahera Barat (dalam%).

Fundamental Makro Ekonomi Kabupaten Halmahera Barat

Sebagai indikator makro ekonomi utama, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dapat menunjukkan perkembangan dari perubahan struktur ekonomi suatu wilayah/ daerah, selain itu dengan PDRB atas harga konstan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dihitung.

PDRB Kabupaten Halmahera Barat tahun 2009 atas dasar harga berlaku sebesar 323,825.81 juta rupiah, mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir dimana tahun 2007 sebesar 238.527,68 juta rupiah dan tahun 2008 meningkat menjadi 281.633,36 juta rupiah. Jika dilihat kontribusinya menurut sektor ekonomi dalam pembentukan PDRB atas dasar

harga berlaku, sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB Kabupaten Halmahera Barat. Urutan selanjutnya penyumbang 2 terbesar PDRB adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Selain sebagai penyumbang terbesar, sektor pertanian menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun yang lebih besar dibanding delapan sektor ekonomi lainnya.

Kinerja perekonomian suatu daerah dapat dinilai dengan berbagai ukuran, secara umum kinerja tersebut dapat diukur melalui suatu besaran yang dikenal dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB bukan hanya berguna untuk menilai perkembangan ekonomi suatu daerah dari waktu ke waktu, tetapi juga membandingkan dengan daerah lain. Secara sektoral besaran ini dapat menerangkan struktur perekonomian daerah bersangkutan, disamping itu, dari angka PDRB dapat pula diperoleh beberapa ukuran turunan seperti pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita.

Pada tahun 2008, PDRB Kabupaten Halmahera Barat baik atas dasar harga berlaku maupun konstan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. PDRB adhb tahun 2008 sebesar 281.633,36 juta rupiah, sedangkan PDRB adhk sebesar 206.586,41 juta rupiah. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2008 mengalami pertumbuhan sebesar 4,16 persen, sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 4,21 persen. Sementara di tahun 2009, PDRB adhk sebesar 323.825,81 juta rupiah.

Pertumbuhan pendapatan perkapita secara riil akan seiring dengan pertumbuhan PDRB riil dengan asumsi tingkat pertumbuhan penduduk relatif stabil. Untuk mengetahui secara rinci dan lengkap mengenai PDRB Kabupaten Halmahera Barat 2009 dapat dilihat pada publikasi khusus mengenai PDRB yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Halmahera Barat.

Bila dilihat struktur perekonomian Kabupaten Halmahera Barat tahun 2009, secara umum tidak mengalami pergeseran dibanding tahun 2008. Sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor industri pengolahan masih menjadi sektor andalan di Kabupaten Halmahera Barat.

Tabel 4.2. Produk Domestik Regional Bruto ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2007 - 2009 (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha	2007	2008	2009
1. Pertanian	90.644,50	116.727,60	139.333,90
2. Pertambangan & Penggalian	360,78	403,76	456,87
3. Industri Pengolahan	52.968,56	58.359,56	63.883,60
4. Listrik, Gas, & Air Bersih	1.441,58	1.542,22	1.670,41
5. Bangunan	1.749,90	2.609,79	3.889,05
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	61.510,87	69.429,61	79.182,67
7. Pengangkutan & Komunikasi			
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	13.556,21	15.228,35	16.545,40
9. Jasa – Jasa	7.338,43	7.887,38	8.810,72
Jumlah	238.527,68	281.633,36	323.825,81

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara

Pendapatan perkapita sebagai salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah merupakan total Pendapatan Regional atau Produk Domestik Regional Neto (PDRN) atas dasar biaya faktor dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Tingkat Kemiskinan Penduduk

Penanggulangan kemiskinan telah menjadi perhatian banyak pihak untuk sekian lama. Tetapi kemiskinan masih menjadi masalah di banyak negara berkembang termasuk Indonesia. Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.



Gambar : 4.2. Potret Kehidupan Sosial Masyarakat

Potret Kehidupan bermasyarakat sangat buram dimana masyarakat hidup hanya bergantung kepada alam, tidak mampu mengoptimalkan lahan di sekitar mereka, peluang untuk membangun akses untuk menjual hasil perkebunan jarak tempuh sangat jauh dari perkotaan harapan inilah yang membuat kehidupan terisolir dari jangkauan keramaian Kota.

Indikator atau ukuran yang sering digunakan dalam memahami tingkat kedalaman kemiskinan penduduk adalah dengan mengetahui seberapa besar tingkat pertumbuhan ekonomi yang berhasil dicapai. Dengan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi, maka diharapkan akan dapat menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakatnya, yang pada gilirannya akan mengurangi pengangguran atau penduduk miskin. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Barat pada

tahun 2008 yang berhasil dicapai adalah sebesar 6,01%, dan pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Halmahera Barat sebesar 5,98%. Walaupun terjadi penurunan dalam pertumbuhan ekonomi, namun tingkat pengangguran malah mengalami penurunan. Dari seluruh angkatan kerja yang berjumlah 45,75 ribu orang tercatat bahwa sebanyak 44,69 ribu orang dalam status bekerja, dan lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, 2009 dengan angkatan kerja yang berjumlah 47,06 ribu orang tercatat bahwa sebanyak 45,44 ribu orang dalam status bekerja. Dengan demikian, telah terjadi penurunan angka pengangguran dari 1,61 ribu orang pada tahun 2009 menjadi 1,06 ribu orang di tahun 2010.

Tabel 4.3. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2005 – 2008

Tahun	Jumlah (000)	Persentase (%)
2005	16.5	16,85
2006	16.4	17,12
2007	15.3	16,19
2008	15.3	16,12

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara

Jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Barat selama periode empat tahun terakhir (2005-2008) terus mengalami penurunan (Tabel 4.3). Dari tabel tersebut jumlah penduduk miskin di daerah ini selama tahun 2005-2008

Menurun sebanyak 1.2 ribu orang, yaitu dari 16,5 ribu orang pada tahun 2005 turun menjadi 15.3 ribu orang pada tahun 2008. Selanjutnya persentase penduduk miskin turun dari 16,85 persen pada tahun 2005 menjadi 16,12 persen pada tahun 2008. Walaupun secara total jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Barat mengalami penurunan, namun bila dilihat perkembangannya setiap tahun antara daerah perkotaan dan perdesaan, nampak bahwa ada perbedaan dalam perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin masing- masing daerah.

Berbeda dengan pendapat para ahli lainnya, yang memandang bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mencerminkan keadilan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Hal ini dikarenakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berhasil dicapai tidak dapat dinikmati oleh sebagian besar penduduk miskin, atau seberapa tinggi tingkat pemerataan yang terjadi. Pemerataan ini secara sederhana diukur dengan melihat berapa persen dari PNB diraih oleh 40% penduduk termiskin, berapa persen oleh 40% penduduk golongan menengah, dan berapa persen oleh 20% penduduk terkaya.

Disamping pemerataan dalam menikmati kue ekonomi, indikator lainnya dalam pengukuran tingkat kemiskinan adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari

Pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran untuk non-makanan. Sebagai ukuran, bila persentase pengeluaran untuk makanan lebih dari 60% dari total pengeluaran, maka tingkat kesejahteraan dapat dikatakan masih rendah. Pada tahun 2009 menunjukkan bahwa pengeluaran penduduk di Kabupaten Halmahera Barat untuk makanan sebesar 67,80%, dan pengeluaran untuk Non- Makanan sebesar 32,20%. Sedangkan pada tahun 2010 pengeluaran rata-rata penduduk untuk makanan meningkat menjadi 68,76%, dan pengeluaran untuk Non-Makanan sebesar 31,24%. Dengan tingginya pengeluaran rata-rata untuk kebutuhan makanan, maka pengeluaran untuk kesehatan, pendidikan, dan lainnya menjadi berkurang. Artinya, pendapatan yang diperoleh rumah tangga hanya digunakan untuk mencukupi kebutuhan makanannya, yang kadang pendapatan yang diperoleh juga tidak cukup.

Tabel 4.4. Persentase Komposisi Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Jenis Pengeluaran, Tahun 2009 – 2010

Tahun	Makanan	Non-Makanan
2009	67,80	32,20
2010	68,76	31,24

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Barat

Oleh karena kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks dan kronis, maka cara penanggulangan kemiskinan pun

Membutuhkan analisis yang tepat melibatkan semua komponen permasalahan, dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer. Upaya-upaya penanggulangan kemiskinan melalui serangkaian kebijakan dan rencana yang langsung terarah kepada kemiskinan (atau orang-orang yang hidup di dalamnya) tampaknya akan lebih efektif, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Namun, tentu saja kita tidak akan dapat melakukan sesuatu guna mereduksi kemiskinan secara langsung tanpa memiliki pengetahuan yang mendalam dan cukup terinci mengenai lokasi, jangkauan atau cakupan, luas atau sebaran, serta segenap karakteristik kemiskinan itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa fungsi pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan antara lain: (1) pemerintah harus melakukan kebijakan untuk menjamin setiap anggota masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti pakaian, makanan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan jaminan keamanan; (2) pemerintah harus meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mendorong perekonomian mereka. Pemerintah melalui kebijakan ekonomi harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam hal permodalan, sumber daya dan pemasaran; dan (3) pemerintah harus tegas dan tanpa kompromi dalam menegakkan hukum, sehingga kewenangan pejabat negara tidak disalahgunakan.

Tingkat Pengangguran

Kesempatan kerja memberikan gambaran besarnya tingkat penyerapan pasar kerja sehingga angkatan kerja yang tidak terserap merupakan masalah karena mereka terpaksa menganggur. Pada tahun 2008 secara total, angkatan kerja di Kabupaten Halmahera Barat cenderung fluktuatif. Nilai angkatan kerja pada tahun 2010 sebesar 45,75 ribu orang, lebih kecil dibanding tahun 2009 sebesar 47,06 ribu orang. Angkatan kerja tahun 2010 sebesar 45,75 ribu orang yang telah bekerja sebanyak 44, 69 ribu orang, yang masing-masing ada yang bekerja di sector pertanian, manufaktur, dan sektor jasa. Nilai angkatan kerja yang fluktuatif, membuat penduduk yang bekerja selama 2008–2010 juga menunjukkan angka yang cenderung fluktuatif. Akan tetapi, angka pengangguran di Kabupaten Halmahera Barat selama periode 2008 –2010 mengalami penurunan secara signifikan.

Tabel 4.5. Angkatan Kerja, Bekerja, dan Pengangguran Di Kabupaten Halmahera Barat (ribu orang)

Tahun	Angkatan Kerja	Bekerja	Pengangguran
2008	42,96	40,86	2,10
2009	47,06	45,44	1,61
2010	45,75	44,69	1,06
Jumlah	135,77	130,99	4,77

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara

Angka pengangguran pada tahun 2008 sebesar 2,10 ribu orang mengalami penurunan pada tahun 2010 sebesar 1.06 ribu

Orang. Secara total angka pengangguran di Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2010 lebih kecil dibanding kabupaten/ kota lainnya yang ada di Provinsi Maluku Utara setelah Kabupaten Halmahera Timur sebesar 1,00 ribu orang.

Upaya untuk menurunkan jumlah pengangguran terbuka melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, masih belum mampu mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir ini cenderung didorong oleh peningkatan konsumsi. Inventasi cenderung tidak meningkat dan bahkan dalam beberapa tahun sebelumnya menunjukkan penurunan.

Dengan demikian, meskipun perekonomian meningkat, penciptaan lapangan kerja sangat lambat. Dengan keterkaitan ini, upaya untuk mengatasi masalah pengangguran harus dilakukan dengan kebijakan yang terpadu yang diarahkan pada penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif, termasuk kebijakan dalam mengatur ketenagakerjaan yang tidak terlalu memberatkan para penanam modal. Dengan iklim penanaman modal yang kondusif, investasi akan meningkat dan pada gilirannya akan meningkatkan penciptaan lapangan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2010 sebesar 2,31%. Bila dibandingkan dengan keadaan di tahun 2008, tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,89%.

Selain meningkatnya pengangguran terbuka, masalah lain yang memerlukan perhatian serius adalah meningkatnya penganggur usia muda (15-19 tahun) dan banyaknya pekerja di

Sektor yang kurang produktif atau sektor informal. Jumlah pekerja yang bekerja di sektor formal cenderung mengalami penurunan.

Tabel 4.6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat – Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Halmahera Barat (%)

Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
2008	66,85	4,89
2009	71,98	3,53
2010	69,78	2,31
Rata – rata	69,54	3,58

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara

Kecenderungan tersebut menunjukkan masalah yang terjadi di sektor riil. Meningkatnya jumlah penganggur usia muda mengindikasikan: (1) kurangnya lapangan kerja baru untuk pekerja usia muda; (2) pendapatan penduduk terbatas sehingga tidak mampu membiayai pendidikan anaknya; serta (3) penduduk usia muda yang harus mencari kerja untuk membantu membiayai kehidupan keluarganya. Melimpahnya tenaga kerja informal yang umumnya berada di sektor pertanian bukan disebabkan oleh peningkatan kapasitas produksi ataupun peningkatan lapangan kerja di sektor pertanian, tetapi karena keterbatasan lapangan kerja di sektor industri atau sektor lainnya. Dengan demikian produktivitas cenderung semakin menurun dan berdampak pada penurunan nilai tukar petani. Ini mengakibatkan rendahnya

Pendapatan pada tingkat yang rawan yaitu di bawah atau sekitar garis kemiskinan.

Tabel 4.7. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja di – Kabupaten Halmahera Barat Menurut Lapangan Usaha Utama (ribu orang)

Lapangan Usaha	Penduduk yang Bekerja	Persentase
Pertanian	27,74	62,07
Manufaktur	2,61	5,84
Jasa	14,34	32,09
Jumlah	44,69	100

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, data diolah.

Melihat data pada Tabel 4.6 di atas, menunjukkan bahwa penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di Kabupaten Halmahera Barat masih banyak yang terserap di sektor pertanian, yakni sebanyak 27,74 ribu orang atau sebesar 62,07 persen dari total angkatan kerja sebanyak 44,69 ribu orang pada tahun 2010. Oleh karena terjadinya peningkatan jumlah penduduk di daerah perdesaan yang lebih tinggi, sehingga secara keseluruhan masyarakatnya bekerja paling banyak di sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama. Disamping belum maksimalnya pemerintah daerah dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi warganya. Dengan demikian, penduduk yang terserap bekerja di sektor manufaktur masih sangat rendah.

Ketimpangan Sosial

Kebijakan pembangunan yang tidak mendorong peningkatan kualitas manusia masing-masing daerah hanya akan membuat daerah yang bersangkutan tertinggal dari daerah yang lain, termasuk dalam hal kinerja ekonominya. Dengan kata lain, peningkatan kualitas modal manusia juga akan memberikan manfaat dalam mengurangi ketimpangan antardaerah. Ramirez, dkk (1998; dalam Sirait, 2007) menyebutkan bahwa ada hubungan timbal balik (*two-way relationship*) antara human capital dan pertumbuhan ekonomi dan itu sudah diterima secara luas namun faktor-faktor spesifik yang menghubungkannya masih kurang dieksplorasi secara sistematis. Secara konvensional, pembangunan sumber daya manusia diartikan sebagai investasi *human capital* yang harus dilakukan sejalan dengan investasi *physical capital*. Indikator kinerja pembangunan sumber daya manusia (*Human Development Indeks*, IPM) mencakup indikator-indikator pendidikan, kesehatan, gizi, dan sebagainya.

IPM sebagai indikator pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Halmahera Barat menunjukkan nilai yang terus meningkat selama dua tahun terakhir. Pada tahun 2008 nilai IPM kabupaten Halmahera Barat tercatat 66,14 persen, berada pada peringkat terakhir di Provinsi Maluku Utara. Pada tahun 2009 peringkat Halmahera Barat tidak mengalami perubahan, tetap pada peringkat terakhir, namun nilai IPM nya mengalami peningkatan menjadi sebesar 66,63 persen. Jika di lihat secara rinci, tingginya IPM Kabupaten Halmahera Barat disebabkan oleh

Belum membaiknya nilai angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf jika dibanding daerah lainnya di Provinsi Maluku Utara yang menyebabkan rendahnya nilai IPM.

Rendahnya IPM di Kabupaten Halmahera Barat yang sampai saat ini berada pada peringkat terakhir di Provinsi Maluku Utara menunjukkan bahwa daerah ini masih belum optimal dalam kebijakan pembangunannya dibanding daerah lainnya. Oleh karenanya IPM memiliki hubungan yang sangat erat dengan pembangunan ekonomi. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi akan mempengaruhi perekonomian melalui peningkatan kapabilitas penduduk dan konsekuensinya adalah juga pada produktifitas dan kreatifitas mereka. Tingkat pendidikan dan kesehatan yang tinggi secara langsung menunjukkan peningkatan dalam IPM. Pendidikan dan kesehatan penduduk sangat menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan pembangunan yang tidak mendorong peningkatan kualitas manusia masing-masing daerah hanya akan membuat daerah yang bersangkutan tertinggal dari daerah yang lain, termasuk dalam hal kinerja ekonominya. Dengan kata lain, peningkatan kualitas modal manusia juga akan memberikan manfaat dalam mengurangi ketimpangan antardaerah. Selain itu, pembangunan modal manusia diyakini tidak hanya dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan, namun juga

Berperan sentral mempengaruhi distribusi pendapatan di suatu perekonomian.

**Tabel 4.8. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Di Kabupaten Halmahera Barat Periode 2008 – 2010**

Tahun	Angka harapan hidup	Angka Melek Huruf	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran per kapita	IPM
2008	63,94	95,30	7,65	595,69	66,14
2009	64,16	95,70	7,75	598,45	66,63
Rata-rata	64,05	95,50	7,70	597,07	66,38

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara.

Melihat dari berbagai indikator IPM yang terdiri dari angka harapan hidup, angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah, Kabupaten Halmahera Barat berada pada peringkat ketiga di Propinsi Maluku Utara. Angka harapan hidup Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2009 (64,16) berada di bawah harapan hidup secara Provinsi Maluku Utara (65,40) dan paling terendah dibanding kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Maluku Utara. Angka melek huruf tercatat sebesar 95,70 persen, serta rata-rata lama sekolah sebesar 7,75 dan berada di bawah secara Provinsi (8,61).

Data pada Tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa angka harapan hidup di Kabupaten Halmahera Barat sebesar 64,16 lebih rendah dari kabupaten/kota lainnya di Provinsi Maluku Utara. Hal ini sangat erat kaitannya dengan tingkat pelayanan kesehatan

Sebesar 18,83 persen, yang juga lebih rendah dari daerah lainnya di Provinsi Maluku Utara. Demikian juga dengan angka melek huruf yang belum menunjukkan perbaikan. Dengan berdasarkan fakta empirik tersebut, menyebabkan IPM Kabupaten Halmahera Barat masih berada pada posisi sebagai juru kunci di Provinsi Maluku Utara.

Kaitannya dengan fenomena tersebut, maka diharapkan pemerintah Kabupaten Halmahera Barat melakukan perbaikan sistem pendidikan, kesehatan, melalui support anggaran (subsidi) yang besar. Dalam konteks makroekonomi, subsidi merupakan salah satu bentuk instrumen fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pendidikan dan kesehatan selain harus dianggap sebagai suatu hak asasi dan bentuk keadilan, juga harus difahami sebagai perbaikan kebebasan masyarakat untuk berkembang dan memperbaiki dirinya, lepas dari lingkaran setan dan jeratan kemiskinan. Efektivitas pencapaian tujuan ini tentu sangat tergantung dari dukungan atau support pemerintah dalam konteks penganggaran investasi fasilitas dasar pendidikan dan pemberian subsidi (*transfer of payment*) khususnya bagi masyarakat miskin. Investasi dalam pendidikan dapat meningkatkan modal manusia dalam perekonomian. Investasi pendidikan dianggap memiliki implikasi yang positif terhadap penambahan sumber daya bagi perekonomian, sehingga dapat meningkatkan output secara umum. Oleh karena itu, perubahan dalam pengeluaran bidang pendidikan yang dipengaruhi oleh kebijakan fiskal jangka pendek akan mendukung proses Akumulasi dalam modal manusia sehingga pada akhirnya akan mendorong pada pertumbuhan ekonomi.

BAB V

HASIL SURVEI DAN PEMBAHASAN

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Pendidikan

Strategi pembangunan di sebagian besar negara memprioritaskan pada pembangunan kualitas modal manusia dengan melakukan perbaikan sistem pendidikan dan support anggaran (subsidi) yang besar. Melalui pendidikan maka insan manusia dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang sangat berguna bagi kelangsungan hidupnya. Melalui pendidikan maka manusia memiliki kemampuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam arena pembangunan. Untuk itu pemerintah punya kepentingan di dalam memajukan pendidikan. Sekolah yang baik hanya dapat diwujudkan dengan memperbaiki manusia yang ada didalamnya (Gorton, 1976).

Ditinjau dari segi pendidikan, petani dan nelayan di Kabupaten Halmahera Barat yang telah disurvei berpendidikan antara SD hingga SLTP. Anak-anak mereka rata-rata juga bersekolah hanya sampai antara SD hingga SLTP, adapun yang berkesempatan mengenyam pendidikan hingga SMU hanya sebagian kecil saja (terutama anak laki-laki). Kondisi pendidikan yang rendah disebabkan karena tidak memiliki uang yang cukup untuk biaya pendidikan yang lebih tinggi, jarak tempuh ke tempat

sekolah yang lumayan jauh, dan keterbatasan sarana pendidikan (gedung sekolah dan guru). Disamping itu Akses pendidikan masih tertumpuk pada pusat-pusat kota kecamatan, dan kabupaten dimana ini terlihat jelas bahwa desa-desa terpencil belum mendapat akses tenaga pendidik seperti di Desa Ibu Utara, dan Desa Akelamo Kao di Kecamatan Jailolo Selatan, serta bantuan pendidikan belum menyentuh pada sebahagian sekolah negeri di desa terpencil dan masih terdapat kekurangan ruang belajar guru dan laboratorium.



**Gambar 5.1. Salah Satu Program Pemerintah:
Sekolah Gratis bagi Siswa pada Jenjang Pendidikan Dasar**



Gambar 5.2. Staf Guru di Kecamatan Jailolo Selatan

Bantuan pendidikan melalui dana BOS hanya pada pendidikan dasar (SD), menyebabkan sebagian besar masyarakat di Kabupaten Halmahera Barat tidak dapat menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Disamping itu, Rendahnya tingkat pendidikan juga dikarenakan letak sekolah di atas tingkatan SD yang rata-rata cukup jauh (± 1 km s/d 5 km) sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat yang pada umumnya berpenghasilan rendah dan tidak mempunyai anggaran tambahan seperti alokasi dana untuk transportasi sekolah. Selain itu, sarana dan prasarana sekolah (gedung dan guru) yang belum memadai bahkan masih terdapat daerah yang tidak memiliki sekolah menyebabkan sebagian besar masyarakat di Kabupaten Halmahera Barat kesulitan dalam memperoleh akses pendidikan yang baik.

**Tabel 5.1. Klasifikasi Pendidikan Responden
Di Kabupaten Halmahera Barat**

Jenjang Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase (%)
Tidak tamat SD	23	17,69
SD	39	30,00
SMP	39	30,00
SMA	22	16,92
Sarjana	7	5,39
Jumlah	130	100,00

Sumber: data Primer, diolah

Berdasarkan data pada Tabel 5.1 di atas, menunjukkan bahwa kebanyakan masyarakat miskin di Kabupaten Halmahera Barat hanya berpendidikan Sekolah Dasar (SD), yakni sebanyak 39 orang atau sebesar 30 persen, sedangkan yang berpendidikan sampai sarjana hanya sebanyak 7 orang (5,39%). Secara keseluruhan, pendidikan masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Halmahera Barat rata-rata hanya mampu mengeyam pendidikan sampai pada tingkat SLTP. Hal tersebut dikarenakan mahalnya biaya pendidikan, jarak tempuh ke sekolah yang lumayan jauh sehingga membutuhkan biaya transportasi, serta kurangnya fasilitas pendidikan dan program pendidikan gratis. Tingkat pendidikan khususnya di Kabupaten Halmahera Barat masih sangat minim, hal ini disebabkan karena kurangnya tenaga guru, dan permohonan guru untuk di mutasikan tidak menurut

aturan waktu yang telah ditetapkan di dalam SK. Akibatnya, tingkat kelulusan pada tahun sebelumnya khususnya di kabupaten Halbar sangat rendah

Tabel 5.2. Klasifikasi Pendidikan Jumlah Guru SMA dan SMK di Kabupaten Halmahera Barat

Kecamatan	Jumlah Guru SMA/ MA Tiap Jenjang				Jumlah	Jumlah Guru SMK Tiap Jenjang				Jumlah
	SLTA	D1,D2, D3	S1	S2		SLTA	D1,D2, D3	S1	S2	
Jailolo	--	8	35	--	43	--	4	36	--	40
Jailolo Timur	--	--	5	--	5	--	--	1	--	1
Jailolo Selatan	--	1	17	--	18	--	--	2	--	2
Sahu	--	1	18	--	19	--	--	--	--	0
Sahu Timur	--	11	6	1	18	--	2	10	--	12
Ibu	--	2	21	--	23	--	--	--	--	0
Ibu Utara	--	--	6	--	6	--	--	1	--	1
Ibu Selatan	--	--	2	--	2	--	--	--	--	0
Loloda	--	--	1	--	1	--	--	--	--	0
	0	23	111	1	135	0	6	50	0	56

Dinas : Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat

Dari jenjang kualifikasi pendidikan sekolah di kabupaten Halmahera Barat sangatlah minim dimana data jumlah guru pada jenjang strata pendidikan di tingkat Sekolah Menengah atas dan Sekolah Menengah Kejuruan sangat jauh berbeda dengan kabupaten-kabupaten lain di Maluku Utara, ini dapat dilihat pada tabel 5.2 bahwa jenjang strata pendidikan banyak pada Strata deploma (D3) baik SMA mau pun SMK sedangkan pada Jenjang S1 masih minim, dan pada jenjang lebih tinggi khusus S2 Magister guru sekolah pada tingkat SMA dan SMK belum

ada. Sedangkan

pada Kabupaten lain Sebagian Guru sekolah ada sudah bergelar Magister.

Pendapatan

Sebagian besar masyarakat yang ada di Kabupaten Halmahera Barat, bermata pencaharian petani, dalam hal ini adalah petani kelapa (kopra), dan sebagian lagi adalah sebagai nelayan (tambak dan perikanan tangkap). Hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat miskin di Kabupaten Halmahera Barat, hampir semuanya mempunyai pekerjaan alternatif sebagai petani dan nelayan dan palawija Tanaman umur pendek seperti (jagung) . Pendapatan petani kelapa secara umum 3-4 bulan sekali panen, jadi menurut masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari baik itu konsumsi nasi, ikan, dan lauk-pauk maupun biaya untuk berobat, di peroleh dari hasil pinjaman kepada pedagang dengan perjanjian bahwa pendapatan dari hasil panen nantinya akan di kurangi dengan pinjaman tadi. Tambahan pendapatan dari pekerjaan alternatif dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Selain petani kelapa, ada petani jagung yang sumber dananya di peroleh dari organisasi GAPOKTAN. Penghasilan yang diperoleh dari hasil pertanian seperti; kopra, ubi, jagung, buah-buahan dan sebagainya sangat tergantung pada hasil panen. Menurut petani jagung tersebut, apabila tidak gagal panen, pendapatan yang diperoleh sebesar Rp. 5.000.000/ 2 bulannya. Biaya produksi untuk penanaman, pemeliharaan, dan lain-lain menurut

warga tersebut secara keseluruhannya

mencapai Rp 500.000,- kemudian dilihat dari sisi kesehatan, masyarakat di kecamatan ibu utara jika sakit mereka memeriksakan diri di puskesmas rata-rata biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 50.000 bahkan ada yang sampai mengeluarkan biaya Rp. 500.000-600.000.



Gambar 5.3. Tanaman Palawija (jagung dan kacang-kacangan) di Desa Goal Kabupaten Halmahera Barat

Pola masyarakat Desa Goal bercocok tanam dengan kebutuhan yang serba manual tradisional dengan keseharian mereka dalam menekun untuk kebutuhan makan sehari-hari, adapun kelebihan dimasa pasca panen terkadang panen mereka hanya di jual di daerah sekitar desa dan pasar lokal, namun bisa mereka membawa hasil panen keluar kabupaten dengan patungan dari beberapa kelompok tani (**Gapoktan**) lebih khususnya

Tanaman jagung dan kacang untuk bisa dipasarkan keluar kota. Hal ini disebabkan pengaruh harga BBM yang tinggi, serta harga dalam pasar lokal sangat terlalu murah.

Kebutuhan hidup masyarakat petani memang tergolong cukup sederhana dilihat dari pola makan dan gaya hidup. Menurut masyarakat di Kabupaten Halmahera Barat, rumah yang mereka bangun secara bertahap karena dana yang dibutuhkan tergantung pada hasil panen mereka. Jika dilihat dari segi ekonomi warga setempat, kurang lebih 80% tergolong dalam taraf kemiskinan, karena pola konsumsi warga setempat atau pun makanan yang mereka konsumsi sehari-hari hanya berupa ubi-ubian dan pisang, sedangkan untuk makanan berupa nasi sangatlah jarang untuk dikonsumsi, disebabkan karena keterbatasan biaya hidup mereka. Tidak ada kehidupan yang terlihat mencolok. Bentuk rumah, misalnya, hampir seluruh gaya rumah sama, yang membedakan terkadang hanya luasnya saja. Perabotnya pun sangat sederhana, hampir semua memasak menggunakan kompor minyak dan tungku serta ada sebagian yang menggunakan kompor gas subsidi dari pemerintah. Makanan yang disantap setiap hari tidak menunjukkan kemewahan sama sekali apalagi memenuhi standar BKKBN. Menurut standar BKKBN Keluarga Pra Sejahtera (Sangat Miskin) yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi indikator ekonomi yang salah satunya makan dua kali atau lebih sehari sedangkan Keluarga Sejahtera I (Miskin) adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang salah satunya

merupakan indikator ekonomi, yaitu paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging atau ikan atau telur. Keluarga Sejahtera II adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang diantaranya meliputi: memiliki tabungan keluarga dan makan bersama sambil berkomunikasi. Sedangkan Keluarga Sejahtera III merupakan keluarga yang sudah dapat memenuhi beberapa indikator yang meliputi: memiliki tabungan keluarga dan makan bersama sambil berkomunikasi. Dan Keluarga Sejahtera III Plus, yaitu keluarga yang sudah dapat memenuhi beberapa indikator meliputi semua poin indikator Keluarga Sejahtera III ditambah dengan aktif memberikan sumbangan material secara teratur serta aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan. Jika menggunakan indikator tersebut, maka penduduk di Kabupaten Halmahera Barat semuanya masuk pada golongan Keluarga Pra Sejahtera (Sangat Miskin) dan Keluarga Prasejahtera I (Miskin) Mereka setiap hari mengkonsumsi nasi dan sayur serta lauk seadanya—terkadang tanpa lauk. Sayurpun didapat dari kebun jika hasil kebun bisa diambil, jika tidak barulah mereka membelinya ke pasar. Demikian pula dengan gaya berpakaian yang seadanya, tidak ada yang terlihat rapi dan memenuhi standar BKKBN, untuk ganti pakaian sesuai dengan acara.

Kehidupan petani memang sangat tergantung dari pendapatan mereka. Setiap harinya belum tentu memperoleh uang, karena waktu menerima pendapatan tidak pasti. Jika mereka hanya mengandalkan hasil pertanian, maka hasil yang

Didapatkan sangat berfluktuasi tergantung dari keberhasilan panen, cuaca, biaya produksi dan harga barang hasil produksi (apakah turun, normal atau naik). Jika kondisi buruk pendapatan petani bisa minus, artinya mengalami kerugian – uang yang digunakan untuk biaya produksi tidak kembali, bahkan terjerat hutang. Karena pada umumnya petani membeli benih pada Gapoktan dengan sistem hutang dan dibayarkan jika sudah panen.

Tabel 5.3. Klasifikasi Pendapatan Responden Di Kabupaten Halmahera Barat

Pendapatan	Jumlah Responden	Persentase (%)
< 500.000	49	36,30
> 500.000 – 1.000.000	36	26,67
> 1.000.000 – 1.500.000	28	20,74
> 1.500.000 – 2.000.000	16	11,85
> 2.000.000	6	4,44
Jumlah	135	100,00

Sumber: data Primer, diolah

Disamping sebagai petani, terdapat sebagian masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Dalam usaha perikanan yang ditekuni masyarakat, sebagian ada yang bergerak pada usaha perikanan tangkap, dan sebagian lainnya sebagai nelayan tambak (udang) dan budidaya rumput laut. Pengusahaan Perikanan tangkap yang terletak di Jailolo Selatan (Sidangoli) masih didominasi nelayan skal kecil dan tradisional dengan tingkat pendidikan yang rendah. Dengan demikian tingkat teknologi,

Inovasi, dan penyerapan informasi menjadi rendah dan pada akhirnya menyebabkan produktivitasnya menjadi rendah. Rendahnya produktivitas nelayan skala kecil menyebabkan pendapatan rumah tangga nelayan dari sektor perikanan rendah dan selanjutnya berpengaruh pula pada struktur pengeluaran rumah tangga nelayan. Dengan pendapatan yang rendah, seringkali nelayan menghadapi kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pokok pangan rumah tangga nelayan maupun kebutuhan non pangan seperti pendidikan dan kesehatan.

Nelayan skala kecil ini memiliki aset usaha penangkapan ikan mulai dari yang tidak bermesin sampai yang bermesin kurang dari 12 PK dan maksimal 1 mesin per alat tangkap adapun yang bermesin katinting. Dalam kegiatan penangkapan tanpa menggunakan tenaga kerja dari luar keluarga, rumah tangga nelayan juga rumah tangga inti (*ayah, ibu, anak.*) dan orang yang tinggal bersama dalam satu atap rumah dan paling sedikit satu anggota keluarga bermata pencarian sebagai nelayan. Produksi melaut pada saat kegiatan penangkap ikan di laut yang dilakukan nelayan dan keluarganya dengan menggunakan alat milik rumah tangga sendiri.

Produksi melaut nelayan dibedakan menjadi 2 yaitu; berdasarkan musim, produksi melaut musim puncak dan produksi melaut musim sedang. Teknologi alat tangkap yang digunakan nelayan skala kecil ditunjukkan dari ukuran kapal atau motor berkapasitas 2 sampai 3 orang ukuran perahu motornya, alat tangkap yang masih tradisional dan cold box yang masih

Minim. Biaya operasi melaut juga merupakan input dari kegiatan produksi komponen biaya operasional melaut antara lain (a) jumlah biaya BBM sekali melaut 5 sampai 10 liter (b) jumlah perbekalan makanan yang merupakan perbekalan makanan yang diperlukan nelayan dalam operasi melaut terdiri dari umpan ikan Rp 15 *ribu*, biaya rokok sebesar Rp.20.000, dan kopi 1 bungkus, dan makanan milik rumah tangga sendiri berupa sagu, serta (c) jumlah biaya retribusi melaut berupa administrasi laut dan lain- lain. Harga ikan dikonversi berdasarkan harga ikan dari hasil tangkapan yang paling dominan di daerah survei berdasarkan jenis ikan dari hasil tangkapan nelayan yaitu ikan sorihi, tude, cakalang, komo, dan lainnya dengan kisaran harga Rp.100 ribu – 150 ribu/ dua hari. Untuk konsumsi ikan jumlah rata-rata yang dikonsumsi masing-masing anggota rumah tangga nelayan setiap hari karena ikan merupakan hasil produksi sendiri dan sebagian dari hasil produksi digunakan untuk konsumsi dalam rumah tangga, untuk konsumsi sayuran itu adalah hasil kebun yang dimiliki oleh sebagian nelayan yang ada di kecamatan, di daerah ini.

Salah satu upaya rumah tangga nelayan skala kecil untuk mencukupi kebutuhan hidup dan kecukupan pangan dilakukan dengan melibatkan anggota rumah tangga nelayan pada usaha penangkapan ikan, maupun kegiatan *non fishing* (di luar perikanan), keterlibatan seorang anggota keluarga dalam kegiatan produksi tersebut merupakan keputusan yang dilakukan bersama dalam suatu rumah tangga yakni suami, istri dan anak, oleh

karena itu untuk memahami ketahanan pangan pada rumah tangga nelayan skala kecil cukup bervariasi mengingat usaha tangkap tidak dilakukan sehari-hari tapi tergantung musim ikan, cuaca dan lain-lain paling tidak seminggu *dua* sampai *tiga* kali melaut selain dari pada itu menyisahkan waktunya untuk bertani untuk menambah kecukupan bertahan hidup sehari-hari.

Pelayanan Kesehatan

Pembangunan di bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sudah banyak dilakukan oleh pemerintah selama ini. Oleh karena itu usaha untuk meningkatkan dan memelihara mutu pelayanan kesehatan perlu mendapat perhatian utama. Upaya tersebut antara lain melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan pengadaan/peningkatan sarana prasarana dalam bidang medis termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat, baik dari sisi harga maupun keterjangkauan wilayahnya.

Untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk, ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan merupakan salah satu faktor penentu utama. Puskesmas dan Puskesmas pembantu merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan karena dapat menjangkau penduduk

sampai di pelosok perdesaan. Selain itu, pelayanan kesehatan agar dapat dijangkau pula oleh sebagian besar penduduk miskin. Upaya dalam pemberian pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin telah dilakukan pemerintah, seperti pelayanan Jamkesmas, Jamkesda, dan Askeskin.

Hasil survei dan wawancara yang dilakukan di Kabupaten Halmahera Barat, umumnya menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan masyarakat masih sangat rendah. Rendahnya pelayanan kesehatan masyarakat dibuktikan dengan kurangnya sarana dan prasarana kesehatan, seperti Puskesmas, Polindes, dan sebagainya. Bahkan terdapat di beberapa desa yang tidak memiliki Puskesmas, sehingga warga kesulitan dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Selain itu, pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin melalui Jamkesda, Jamkesmas, maupun Askeskin masih terasa belum bermanfaat bagi masyarakat. Hal tersebut disebabkan tidak adanya sosialisasi yang baik tentang fasilitas kesehatan tersebut sehingga sebagian besar masyarakat tidak merasakan manfaat dari kepemilikan fasilitas tersebut.

Kurangnya sarana dan prasarana kesehatan menyebabkan masyarakat hanya bisa menggunakan obat-obatan yang harganya cukup mahal. Disamping itu, pelayanan kesehatan di luar jam kerja akan dikenakan biaya, serta penggunaan tenaga medis seperti bidan desa juga tidak gratis, serta penggunaan Jamkesda belum efektif jika dilihat dari pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat. Walaupun sebagian besar masyarakat miskin

telah memiliki Jamkesda, Jamkesmas, dan Askeskin, namun jika pemeriksaan kesehatan diluar jam kerja (08.00 – 15.00) maka akan dikenakan biaya. Disamping mahalnyanya dan belum efektifnya pelayanan kesehatan, jarak tempuh yang cukup jauh ke tempat pengobatan (Puskesmas dan Polindes), menyebabkan masyarakat juga harus menanggung biaya transportasi, sehingga terdapat sebagian masyarakat yang menggunakan pengobatan tradisional atau Dukun.

Tabel 5.4. Banyaknya Polindes dan Klinik KB Menurut Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2009

Kecamatan <i>District</i>	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Jailolo	3	3	4
2. Jailolo Timur	2	2	2
3. Jailolo Selatan	4	4	4
4. Sahu	2	2	2
5. Sahu Timur	2	2	2
6. Ibu	1	1	1
7. Ibu Selatan	1	1	1
8. Ibu Utara	1	1	1
9. Loloda	3	3	3
Jumlah	19	19	20

Sumber : Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah Halmahera Barat, 2009

Sebagian besar posyandu yang tersebar pada sebagian kecamatan ada hanya bukti fisik bangunan akan tetapi kenyataan sebagian besar tidak ada tenaga medis, inilah yang merupakan

buramnya potret kesehatan di Halmahera Barat, misalnya di kecamatan Loloda 3 buah posyandu sudah sejak tahun 2006 tidak ada bidan, dan tenaga perawat.

Tabel 5.5. Banyaknya Tenaga Medis/ Para Medis di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2007-2009

Tenaga Medis/ Para Medis <i>Medic/ Paramedic Personnel</i>	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)
-Dokter Spesialis/ <i>Specialst Physician</i>	-	-	-
- Ahli Bedah/ <i>Surgeon</i>	-	-	-
- Ahli Kandungan/ <i>Gynecologist</i>	-	-	-
- Ahli Penyakit Dalam/ <i>Internist</i>	-	-	-
- Ahli THT	-	-	-
- Ahli Panyakit Anak / <i>Pediatrist</i>	-	-	-
- Ahli Mata/ <i>Oculist</i>	-	-	-
- Ahli Radiologi/ <i>Radiologist</i>	-	-	-
Dokter Umum/ <i>General Physician</i>	21	9	10
Dokter Gigi/ <i>Dentist</i>	1	-	-
Apoteker/ <i>Pharmacist</i>	10	3	2
Sarjana Kesehatan Masyarakat	8	11	12
Perawat/ <i>Nurses</i>	56	44	67
Juru Kesehatan SPKU	-	-	-
Asisten Rontgen/ <i>Rontgen Assistant</i>	-	-	2
Asisten Apoteker/ <i>Pharmacist Assistant</i>	2	1	65
Bidan/ <i>Obstetrician (PTT)</i>	-	-	12
Analisis/ <i>Analyst</i>	18	14	31
Sanitasi	4	3	-
Ahli Gizi (SPAG)/ <i>Nutritionist</i>	-	-	-
PPPU	6	4	-
Pekarya SLA	32	20	-
Akademi Perawat/ <i>Nurse Academy</i>	-	-	-
Akademi Penilik Kesehatan	12	10	-
Akademi Gizi	-	1	-
Akademi Analisis Kesehatan	3	4	4
Perawat Gigi			

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat 2009

Masalah kesehatan di Kabupaten Halmahera Barat. pelayanan masih minim dalam akses memberikan pelayanan mulai dari tingkat dusun, desa sampai ke tingkat kecamatan mulai dari masalah jamkesda, jamkesmas. Sering masalah ini masih terbatas dalam hal sosialisasi ke tingkat masyarakat.

Kabupaten Halmahera Barat dengan kondisi dengan adanya pemekaran kecamatan sangat dibutuhkan pelayanan kesehatan inilah kesiapan pembangunan di tiap-tiap kecamatan selalu ada fasilitas puskesmas milik pemerintah sehingga sumber daya manusia juga harus seimbang dengan tingkat pelayanan masyarakat hal ini, tidak sesuai dengan fakta dimana disparitas/kesenjangan di tiap-tiap kecamatan mengalami problem sendiri-sendiri dengan tidak tersedia tenaga medis dan dokter. Seiring banyak tersebar sebagian besar tenaga medis dan dokter terkonsentrasi di Kota Kabupaten inilah yang menyebabkan sebagian besar kecamatan mengalami kekurangan tenaga kesehatan.

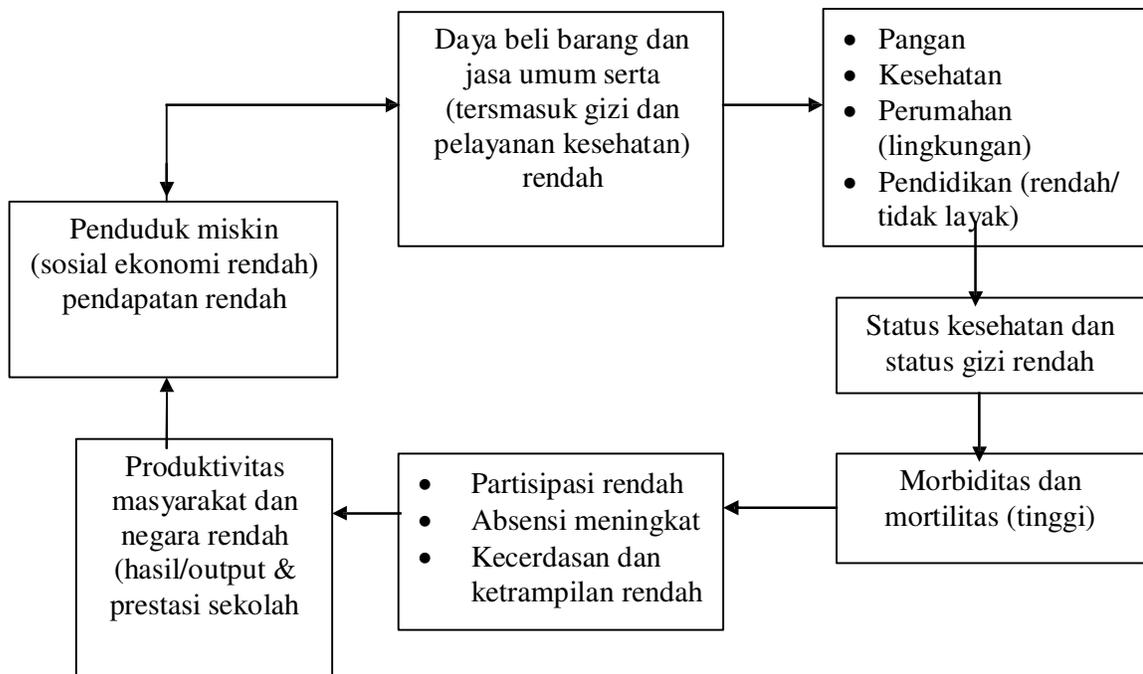
Daerah yang memiliki sarana dan prasarana kesehatan yang cukup memadai adalah Kecamatan Jailolo, Jailolo Selatan, Jailolo Timur, Sahu dan Kecamatan Sahu Timur. Walaupun demikian, masih terdapat permasalahan dalam pelayanan kesehatan masyarakat, seperti kurangnya tenaga medis, mahalnya biaya pengobatan di luar tanggungan Jamkesda, Jamkesmas, dan Askeskin. Sementara, daerah yang pelayanan kesehatan masyarakatnya masih sangat minim adalah kecamatan Ibu, Ibu Utara, Ibu Tengah, dan Kecamatan Loloda. Daerah-daerah yang

Pelayanan kesehatannya minim, yang mana masih banyak yang belum memiliki Puskesmas, tenaga medis, kekurangan dan mahal biaya pengobatan, serta jauhnya jarak tempuh ketempat pengobatan.

Penyebab Kemiskinan

Hasil diskusi melalui pendekatan *in depth interview* dan *focus group discuss* (FGD) kepada ± 130 responden yang tersebar di Kabupaten Halmahera Barat yang menjadi lokasi kajian menunjukkan bahwa harapan masyarakat (petani & nelayan) antara lain adalah: keberhasilan panen, kestabilan harga dan kelancaran input produksi.

Gambar 5.4 Skema Perangkap Kemiskinan (*poverty trap*)



Sumber: Mas'ood, 1994.

Asumsi dari ketiga keadaan tersebut adalah minimalisasi kerugian. Berbagai macam kendala dihadapi petani dalam rangka mewujudkan harapan mereka. Kendala-kendala tersebut yang pada akhirnya dapat menjadi penyebab kemiskinan petani. Hasil analisis kendala yang menjadi masalah petani ditunjukkan dalam diagram masalah kemiskinan di atas.

Penyebab kemiskinan di masyarakat khususnya di pedesaan disebabkan oleh keterbatasan aset yang dimiliki, antara lain:

- a. *Natural assets* : seperti tanah dan air, karena sebagian besar masyarakat desa hanya menguasai lahan yang kurang memadai untuk mata pencahariannya.
- b. *Human assets* : menyangkut kualitas sumber daya manusia yang relatif masih rendah dibandingkan masyarakat perkotaan (tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan maupun tingkat kesehatan dan penguasaan teknologi).
- c. *Physical assets* : minimnya akses ke infrastruktur dan fasilitas umum seperti jaringan jalan, listrik, dan komunikasi di pedesaan.
- d. *Financial assets* : berupa tabungan (*saving*), serta akses untuk memperoleh modal usaha.
- e. *Social assets* : berupa jaringan, kontak dan pengaruh politik, dalam hal ini kekuatan *bargaining position* dalam pengambilan keputusan-keputusan politik.



Gambar 5.5. Dusun Kedi Kecamatan Loloda

Jika penyebab kemiskinan tersebut dikaitkan dengan sebab akibat kemiskinan penduduk, maka akan ditemukan banyak sekali persamaan. Diantaranya faktor ketidakpastian pasar, infrastruktur yang kurang memadai, Sehingga jika sektor pertanian maupun perikanan dijadikan sebagai mata pencaharian utama dan hanya mengandalkan sektor tersebut, maka akan sulit bagi petani maupun nelayan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka. Dapat dikatakan bahwa *natural asset* akan mempengaruhi tingkat kemiskinan petani dan nelayan. Demikian halnya dengan *human asset*, di mana kualitas sumber daya manusia masyarakat petani masih tergolong sangat rendah, baik ditinjau dari pendidikan, penguasaan teknologi, dan ketrampilan

(skill). Walaupun secara nyata, mereka tidak pernah kelaparan tetapi apa yang mereka konsumsi sehari-hari tidak memenuhi standar kecukupan gizi. Selain itu pola hidup bersih yang akan berpengaruh pada kesehatan juga kurang terjaga. Berkaitan dengan *financial asset* masih sulit untuk diakses walaupun tidak sulit untuk didapat. Ada beberapa hal yang mempengaruhi, mengapa petani tidak memanfaatkannya lembaga keuangan bank dengan baik, antara lain adanya bunga yang cukup tinggi serta syarat peminjaman modal yang tidak bisa dipenuhi oleh semua orang dan tidak adanya keinginan atau budaya *saving*.

Penyebab Pengangguran

Kesempatan kerja atau pengangguran tenaga kerja pada dasarnya merupakan masalah yang dihadapi semua negara, baik negara berkembang maupun negara industri maju. Walaupun intensitas dari masalah tersebut mungkin sekali berbeda antar negara karena adanya perbedaan pada faktor-faktor yang mempengaruhi seperti laju pertumbuhan ekonomi, teknologi yang dipergunakan dan kebijaksanaan pemerintah. Hasil kajian di Kabupaten Halmahera Barat menunjukkan bahwa kurangnya lapangan pekerjaan merupakan penyebab utama semakin bertambahnya angka pengangguran. Selain itu, rendahnya skill masyarakat, sehingga penyerapan tenaga kerja yang menganggur di sektor formal sangat kecil. Permasalahan ketenagakerjaan menjadi perhatian serius pemerintah dengan terus berupaya

memperbaiki infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, dan masalah kelistrikan untuk mendorong masuknya investasi.

Melimpahnya tenaga kerja informal yang umumnya berada di sektor pertanian bukan disebabkan oleh peningkatan kapasitas produksi ataupun peningkatan lapangan kerja di sektor pertanian, tetapi karena keterbatasan lapangan kerja di sektor industri atau sektor lainnya. Dengan demikian produktivitas cenderung semakin menurun dan berdampak pada penurunan nilai tukar petani. Ini mengakibatkan rendahnya pendapatan pada tingkat yang rawan yaitu di bawah atau sekitar garis kemiskinan.

Berdasarkan hasil survei dan wawancara yang dilakukan di Kabupaten Halmahera Barat, menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat bekerja di sektor pertanian dan sektor perikanan. Hal ini berarti bahwa banyaknya penduduk yang bekerja di sektor informal. Kurangnya lapangan pekerjaan dan rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan sebagian masyarakat yang ada di Kabupaten Halmahera Barat terpaksa harus bekerja di kedua sektor tersebut.

Masyarakat petani yang ada kebanyakan mengusahakan tanaman perkebunan (monokultur) berupa kelapa, pala, cengkeh, dan sebagainya. Dengan demikian, jika belum masuk waktu panen, terpaksa mereka harus menganggur. Walaupun demikian terdapat sebagian warga yang memiliki usaha pembuatan atap rumah. Pendapatan yang diterima pula dari hasil panen, masih belum bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Oleh karena kurangnya lapangan pekerjaan, yang menyebabkan sebagian besar masyarakat bekerja di sektor pertanian dan perikanan. Selain itu, usaha pertanian yang diusahakan adalah hanya tanaman perkebunan (monokultur), dan tidak ditanami dengan tanaman bulanan lainnya. Hal tersebut mengakibatkan persoalan penyebab pengangguran yang terjadi di Kabupaten Halmahera Barat adalah ketika belum datangnya masa panen, sehingga dengan terpaksa masyarakat petani tidak bekerja (menganggur). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengangguran yang terjadi di Kabupaten Halmahera Barat adalah pengangguran yang bersifat musiman.

Dalam menghadapi permasalahan ini perlu dipertimbangkan secara cermat langkah kebijakan yang dapat mendorong penciptaan lapangan kerja dan sekaligus meningkatkan pendapatan tenaga kerja. Pemberian prioritas pada sektor pertanian, melalui peningkatan perluasan usaha, di satu pihak memang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian. Namun peningkatan nilai tambah yang terjadi pada sektor pertanian relatif terbatas terutama karena jenis komoditas dan harga komoditas pertanian yang relatif tidak meningkat. Untuk itu, perlu diupayakan peningkatan kegiatan sektor industri pengolahan yang memungkinkan peningkatan penyerapan tenaga kerja sehingga terjadi perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri pengolahan dengan tetap memperkuat ketahanan pangan yang tinggi.

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Demikian halnya dengan permasalahan kemiskinan yang terjadi pada petani. Penanggulangan masalah kemiskinan petani tidak bisa hanya diselesaikan dengan menunggu bantuan dari pemerintah yang bersifat *charity*, bantuan yang sifatnya memotivasi dan dapat menciptakan simbiosis mutualisme.

Demikian halnya dengan penanganan persoalan kemiskinan hingga ke akar masalah, yang dibutuhkan selain keterbukaan dan kepekaan pemerintah, yang terpenting adalah fokus dan ketepatan program penanggulangan kemiskinan yang dirancang serta dilaksanakan di lapangan. Mungkin benar bahwa kegagalan berbagai program pembangunan dan upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan selama ini sebagian disebabkan karena moral *hazard*, *bad governance* atau karena kinerja birokrasi yang kurang maksimal. Akan tetapi, sekadar memperbaiki kualitas transparansi atau kontrol atas pelaksanaan kebijakan pembangunan sesungguhnya bukan jaminan bahwa otomatis kemudian akan terjadi perbaikan dan pengembangan sistem ekonomi tangguh yang berkemanusiaan.

Upaya untuk memberdayakan kegiatan produktif petani miskin dan meningkatkan posisi *bargaining* mereka terhadap semua bentuk eksploitasi dan superordinasi, tak pelak prasyarat yang dibutuhkan adalah kemudahan ekonomi (*economic facilities*) yang benar-benar nyata dan peluang-peluang sosial (*social opportunities*) yang memihak kepada petani miskin. Kemudahan ekonomi adalah kesempatan dan makin terbukanya akses

masyarakat miskin terhadap berbagai sumber permodalan dan pasar. Sedangkan yang dimaksud peluang-peluang sosial adalah upaya untuk membangun investasi sosial lewat program-program pemberdayaan sosial dan kemudahan berusaha serta meningkatkan kesempatan masyarakat miskin untuk melakukan mobilitas sosial-ekonomi secara vertikal melalui pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan bahkan kebutuhan untuk melakukan partisipasi politik secara aktif.

Upaya untuk memberdayakan petani dan membangun sistem ekonomi tangguh yang berkemanusiaan niscaya tidak akan pernah bisa berhasil jika terlalu kental ditunggangi oleh kepentingan politis atau kepentingan pribadi pihak-pihak tertentu yang berkecimpung dalam dunia politik. Di sisi lain, seyogyanya juga disadari bahwa upaya memberantas kemiskinan tidaklah mungkin dapat berhasil jika dilakukan secara sepotong-sepotong, temporer, tidak kontekstual, dan apalagi jika semuanya dilakukan dengan tidak konsisten. Kegiatan penanggulangan kemiskinan selain membutuhkan energi, dana yang besar dan komitmen yang benar-benar serius, yang tak kalah penting adalah perencanaan program penanggulangan kemiskinan yang benar-benar matang.

Penanganan masalah kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh dan kontekstual, menyeluruh berarti menyangkut seluruh penyebab kemiskinan, sedangkan kontekstual mencakup faktor lingkungan si miskin. Untuk dapat merumuskan kebijakan yang tepat dalam menangani kemiskinan perlu pengkajian yang mendalam

tentang profil kemiskinan itu sendiri. Sehingga

aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat sesuai dengan karakteristik masyarakat tersebut dan dapat berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable*). Beberapa kebijakan yang disarankan untuk tetap ditindaklanjuti dan disempurnakan implementasinya adalah perluasan akses kredit pada masyarakat miskin, peningkatan pendidikan masyarakat, perluasan lapangan kerja dan membudayakan *entrepreneurship*.

Kepemilikan modal sosial yang kuat dalam jaringan petani merupakan syarat bagi keberlangsungan adanya tindakan kolektif (*collective action*) yang mengarah pada perubahan sosial petani untuk menjadi lebih baik dalam berbagai dimensi kehidupan seperti: struktur sosial, sosio-ekonomi serta sosio-kultural. Unsur- unsur modal sosial telah dimiliki oleh petani, tinggal bagaimana untuk mempertahankan modal sosial tersebut agar menjadi suatu kekuatan yang dapat merangsang dan mendorong aksi bersama masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan yang mereka hadapi.

Kebijakan Penanggulangan Pengangguran

Keadaan angkatan kerja suatu masyarakat secara umum dapat menggambarkan kehidupan sosial masyarakat tersebut. Sejalan dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, jumlah angkatan kerjapun senantiasa meningkat dari tahun ke tahun, oleh karena itu pemerintah harus membangun kembali kesempatan kerja dengan mempersiapkan seluruh masyarakatnya dengan memberi perhatian,

keterampilan dan kapasitas untuk

Disamping itu, kesempatan kerja juga terkait dengan kemampuan setiap sektor ekonomi dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja. Salah satu cara yang terbaik untuk mengetahui kemampuan setiap sektor ekonomi dalam penciptaan kesempatan kerja adalah dengan cara menentukan proporsi lapangan kerja yang dihasilkan untuk penduduk suatu daerah per sektor. Analisis ini sering disebut dengan rasio penduduk- kesempatan kerja.

Melihat kecenderungan terjadinya penurunan kesempatan kerja dalam sektor industri di Kabupaten Halmahera Barat, maka diharapkan peranan pemerintah untuk bisa meningkatkan penciptaan kesempatan kerja. Pemerintah dapat mempengaruhi permintaan dalam perekonomian dengan menggunakan kebijakan fiskal yaitu dengan cara menaikkan atau mengurangi pengeluaran pemerintah dan subsidi, meningkatkan atau mengurangi tingkat pajak. Dengan demikian, diharapkan dapat memperbaiki iklim investasi (khususnya pada sektor industri) yang nantinya terjadi peningkatan dalam kesempatan kerja.

Mengingat penanaman modal (investasi) merupakan determinan penting dalam menciptakan kesempatan kerja di Kabupaten Halmahera Barat, maka pemerintah daerah perlu lebih profesional dalam merumuskan suatu kebijakan yang dapat berdampak pada penciptaan kesempatan kerja yang lebih baik di masa yang akan datang, sehingga secara tidak langsung terjadi peningkatan dalam pendapatan perkapita dari masyarakat. Selain

Itu juga kebijakan pemerintah agar tidak menghambat investasi, sehingga para pengusaha akan lebih terdorong untuk melakukan ekspansi dalam usahanya, yang bertendensi pada penciptaan kesempatan kerja.

Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan

Dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable development*), sektor pendidikan memainkan peranan yang sangat strategis khususnya dalam mendorong akumulasi modal yang dapat mendukung proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya. Pembangunan pendidikan tidak berdiri sendiri dalam meningkatkan output, tetapi juga bersama - sama dengan penambahan modal fisik. Pembangunan pendidikan bukan kuantitas tetapi kualitasnya yang menyebabkan nilai stock manusia meningkat. Peningkatan keduanya berlangsung terus menerus secara berkelanjutan serta dilandasi oleh keinginan dan komitmen politik pemerintah untuk melaksanakannya walaupun dengan biaya relatif besar. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Chenery, et al. (1975), bahwa penambahan modal fisik maupun peningkatan kualitas modal manusia tentu memerlukan investasi secara kontinyu yang tidak sedikit (Djojohadikusumo, 1994).

Kewajiban pemerintah baik pusat maupun daerah propinsi dan daerah tingkat II punya kewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan dan memberikan prioritas pada

anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD. Melalui

Pendidikan maka manusia memiliki kemampuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam arena pembangunan. Untuk itu pemerintah punya kepentingan di dalam memajukan pendidikan. Sekolah yang baik hanya dapat diwujudkan dengan memperbaiki manusia yang ada didalamnya (Gorton, 1976).

Pendidikan dan kesehatan selain harus dianggap sebagai suatu hak asasi dan bentuk keadilan, juga harus difahami sebagai perbaikan kebebasan masyarakat untuk berkembang dan memperbaiki dirinya, lepas dari lingkaran setan dan jeratan kemiskinan. Efektivitas pencapaian tujuan ini tentu sangat tergantung dari dukungan atau support pemerintah dalam konteks penganggaran investasi fasilitas dasar pendidikan dan pemberian subsidi (*transfer of payment*) khususnya bagi masyarakat miskin.

Pemikiran yang disampaikan oleh Robert Lucas (1980), yang meyakini bahwa investasi dalam pendidikan dapat meningkatkan modal manusia dalam perekonomian. Investasi pendidikan dianggap memiliki implikasi yang positif terhadap penambahan sumber daya bagi perekonomian, sehingga dapat meningkatkan output secara umum. Oleh karena itu, perubahan dalam pengeluaran bidang pendidikan yang dipengaruhi oleh kebijakan fiskal jangka pendek akan mendukung proses akumulasi dalam modal manusia sehingga pada akhirnya akan mendorong pada pertumbuhan ekonomi. (Keuschnigg and Fisher, 2002 dalam Zagler and Durnecker, 2003).

Sarana dan prasarana pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Halmahera Barat yang sangat minim menyebabkan masyarakat miskin kesulitan dalam memperoleh pendidikan dan kesehatan yang memadai. Disamping mahal biaya, kurangnya tenaga medis dan tenaga guru, serta jarak tempuh ke lokasi sekolah dan Puskesmas/ Polindes yang lumayan jauh, membuat masyarakat miskin terpaksa hanya menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan hanya menggunakan obat-obatan murah ataupun tenaga Dukun. Dengan melihat kondisi pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Halmahera Barat yang sangat memprihatinkan, maka sangat diperlukan campur tangan pemerintah yang cukup besar sehingga dapat menjangkau sampai ke masyarakat perdesaan (miskin). Hal ini dilakukan dengan mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, serta perlu adanya rekrutmen tenaga medis dan tenaga guru yang dapat melayani masyarakat sampai di tingkat perdesaan. Selain itu, perlu adanya subsidi pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin, serta sosialisasi penggunaan fasilitas kartu Jamkesmas/ Jamkesda dan Askeskin.

Ketergantungan masyarakat petani dan nelayan pada hasil panennya, menyebabkan masyarakat tersebut tidak dapat keluar dari kondisi kemiskinan, sehingga keterjangkauan masyarakat terhadap pendidikan rata-rata hanya sampai pada tingkat SLTP. Kemiskinan yang membelenggu kedua kelompok masyarakat tersebut serta mahal biaya pendidikan, membuat mereka tidak

Memiliki biaya untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai pada pendidikan tinggi. Disamping itu, kurangnya fasilitas pendidikan berupa gedung sekolah, sementara jumlah penduduk usia sekolah cukup banyak, sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Dengan demikian, hanya masyarakat yang mampu secara ekonomi yang dapat memperoleh layanan pendidikan yang baik. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengadakan pelayanan pendidikan yang lebih merata bagi setiap masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan subsidi silang dana pendidikan atau pemberian beasiswa maupun kebijakan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan kajian sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Halmahera Barat kebanyakan terdapat pada masyarakat pedesaan dan masyarakat pesisir, yang mana bekerja sebagai petani dan nelayan. Hal ini disebabkan kondisi sosial ekonomi masyarakat petani dan nelayan berada dalam situasi yang sangat terbelakang. Hasil dari usahatani yang diperoleh tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitu pula dengan masyarakat nelayan yang sangat tergantung pada besarnya hasil tangkapan, yang mana dalam setiap melaut sangat tergantung pada cuaca, serta tingginya biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam setiap melaut. Penghasilan yang diperoleh sebagian besar masyarakat hanya sebesar kurang dari Rp. 500.000, sementara pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari cukup tinggi. Kebutuhan masyarakat tersebut, seperti: kebutuhan untuk makanan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Dengan demikian, kondisi tersebut tidak dapat mengeluarkan mereka dari perangkap kemiskinan.

2. Pengangguran di Kabupaten Halmahera Barat kebanyakan bersifat musiman. Hal ini dikarenakan kebanyakan masyarakat bekerja di sektor pertanian dan sektor perikanan, dan jenis tanaman yang diusahakan hanya tanaman perkebunan (monokultur) berupa kelapa, ubi, buah-buahan, dan sebagainya sehingga penghasilan yang diterima hanya setiap 3 – 4 bulan (sekali panen). Disamping itu, masyarakat nelayan tambak udang dan budidaya rumput laut juga tergantung pada hasil panen yang tidak setiap bulan. Dengan demikian, jika belum tiba waktu panen, maka dengan terpaksa masyarakat tersebut tidak bekerja (menganggur).
3. Ketimpangan sosial masyarakat di Kabupaten Halmahera Barat di tunjukkan dari ketimpangan dalam penghasilan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan yang diperoleh. Penghasilan yang diterima masyarakat miskin (petani dan nelayan) hanya bisa mencukupi kebutuhan untuk makan sehari-hari. Namun, tidak cukup untuk biaya pendidikan dan kesehatan, sehingga harus berhutang kepada pedagang yang nantinya dibayar setelah panen. Rata-rata pendidikan masyarakat petani dan nelayan di Kabupaten Halmahera Barat adalah Sekolah Dasar (SD) dan sebagian lainnya SLTP. Hal ini disebabkan mahalnya biaya pendidikan, bantuan dana BOS hanya di tingkat SD, serta jarak sekolah yang lumayan jauh sehingga diperlukan biaya tambahan untuk transportasi. Disamping itu, fasilitas kesehatan yang

Terbatas dan cukup mahal sehingga menyebabkan masyarakat miskin hanya bisa menggunakan obat-obatan yang murah untuk pengobatan.

Rekomendasi

1. Melihat kondisi kemiskinan petani dan nelayan di Kabupaten Halmahera Barat, maka diperlukan suatu kebijakan pemerintah daerah yang dapat meningkatkan pendapatan petani dan nelayan. Hal tersebut dapat ditempuh dengan cara menyediakan pasar bagi hasil produksinya, menjaga kestabilan harga serta kemudahan dalam akses informasi. Disamping itu, pemerintah perlu menyediakan dan memperbaiki infrastruktur dasar yang diperlukan bagi pembangunan pertanian, misalnya pengadaan jalan, jembatan, sistem irigasi, kajian dan pengembangan, serta penyuluhan. Selanjutnya, memudahkan petani dalam akses terhadap permodalan sehingga mempermudah distribusi barang-barang pertanian hingga ke pasar, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan petani.
2. Oleh karena pengangguran yang terjadi adalah pengangguran musiman, maka pemerintah perlu menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat yang sesuai dengan skill yang mereka miliki. Selain itu, bagi masyarakat petani, agar didorong untuk mengusahakan jenis tanaman lainnya yang dapat dipanen setiap bulan sehingga mereka

tetap bisa bekerja. Selanjutnya, perlu ada bantuan dalam teknologi pertanian dan permodalan serta penyuluhan- penyuluhan kepada masyarakat petani maupun nelayan terkait dengan kegiatan usahanya sehingga mereka dapat meningkatkan hasil produksinya.

3. Mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan serta kurangnya fasilitas menyebabkan masyarakat petani dan nelayan hanya bisa menempuh pendidikan sampai pada tingkat SD. Sementara pelayanan kesehatan yang menggunakan Jamkesda maupun Jamkesmas masih belum efektif, sehingga dengan terpaksa masyarakat hanya bisa menggunakan obat-obatan murah serta sebagian masyarakat lainnya berobat ke dukun. Oleh karena itu, maka pemerintah perlu meningkatkan pelayanan kesehatan tersebut dengan membangun puskesmas atau polindes di daerah-daerah yang agak terpencil, menambah tenaga medis, menyediakan obat-obatan generik, serta perlu adanya sosialisasi terkait penggunaan fasilitas kartu Jamkesmas maupun Jamkesda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu bakar, Abu Sufian & Anizah MD. Ali. 2004. *Kepentingan Modal Sosial dalam Pertumbuhan Ekonomi*. IJMS 11 (SPECIAL ISSUE), 197-212 (2004). Fakultas Ekonomi Universiti Utara Malaysia.
- Alfranca, Oscara.; Miguel - Angel Galindo Martin and Blanca Sanchez - Robles. 2001. *Economic Growth and Income Distribution in the OECD Countries*.
- Andreosso, Bernadette and O' Callaghan. 2002. *Human Capital Accumulation and Economic Growth in Asia*, The Workshop on Asia Pacific Studies in Australia and Europe: A Research Agenda for the Future, Australian National Univesrsity, 5 – 6 July 2002. National Europe Centre Paper 20.
- Anwar, Arsyad, 1992, *Transformasi Struktur Ketenagakerjaan Menurut Sektor Penduduk Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Makalah disampaikan pada Seminar Ciri Demografis Kualitas Penduduk dan Pembangunan Ekonomi, Kerjasama Lembaga Demografi FE-UI dan ISEI, Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Kajian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Dahlin, Brian. G. 2002. *The Impact of Education on Economic Growth : Theory, Finding and Policy Implication*. Duke University.
- Friedmann, John. 1992. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Oxford. Blackwell Publishers. USA.

-
- Gorton,R.A. 1976. *School Administration*. Dubuque, Iowa : WM. C. Brown Comapany Publisher.p. 149.
- Heckman, J. J. 2005. "*China's Human Capital Investment*." *China Economic Review* 16 (2005) 50–70.
- Herlambang, Tedy; Sugiarto Brastoro, dan Said Kelana. 2001. *Ekonomi Makro; Teori, Analisis, dan Kebijakan*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kuncoro, Mudarajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Penerbit UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Latif, Abdul, 1994, *Kebijaksanaan Pembangunan Ketenagakerjaan dan Permasalahannya*, Makalah disampaikan pada Sekolah Staf dan Komando TNI-AD Angk. IV, 11 Januari Bandung.
- Lukisari, Dyah, 2003, *Perencanaan Kebijakan Tenaga Kerja*, Majalah Perencanaan Pembangunan, No.31, Hal 11 – 15, Jakarta.
- Mankiw, Gregory N., 2003. *Makroekonomics 5th Edition*. New York and Basingstoke by Worth Publishers.
- Mantra, Ida Bagoes, 2003. *Filsafat Kajian & Metode Kajian Sosial*. Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mas'oeed, Mochtar. 2003. *Politik, Birokrasi, dan Pembangunan*. Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J 2006. *Metodologi Kajian Kualitatif, Edisi Revisi*. Penerbit PT REMAJA ROSDAKARYA. Bandung.
- Muttaqin, Hidayatullah. 2006. *Peran Negara dan Masyarakat dalam Mengatasi Kemiskinan*. <http://www.e-syariah.net/artikel.asp>

-
- Sahdan, Gregorius. 2007. Menanggulangi Kemiskinan Kota. <http://www.kemenegpdt.go.id/artikel.asp?id>
- Saragih, Ahmad Alamsyah. 2007. *Kemiskinan dan Negara*. Jurnal MAARIF no.1.vol.2.
- Satria, Dias. 2008. *Modal Manusia dan Globalisasi: Peran Subsidi Pendidikan*. Faculty of economics Brawijaya. Malang.
- Schiller, B. R. 1973. *The Economic of Poverty and Discrimination*. Tokyo: Prentice Hall.
- Sirait, Robby. 2007. *Hubungan Antara Pembangunan Manusia dengan Pertumbuhan Ekonomi*. <http://robbyalexandersirait.wordpress.com/2007/10/04/hubungan-antara-pembangunan-manusia-dan-pertumbuhan-ekonomi/>. Di Download pada tanggal 13 November 2008.
- Strauss, Anselm & Corbin, Juliet, 2003. *Dasar – Dasar Kajian Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*. Terjemahan. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1997. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. PT Bina Parawira. Jakarta.
- Syaukani, H.R, 2003, *Karakteristik dan Struktur Kesempatan Kerja di Kabupaten Kutai Kartanegara*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Kajian Ekonomi Negara Berkembang, Vol. 8, N0.1 Juni, hal 63 - 71.
- Teixeira, Aurora and Natercia Fortuna. 2003. *Human Capital, Innovation Capability and Economic Growth*, Investigacao Trabalhos em curso. No. 131. Julho de 2003.
- Tjiptoherijanto, Prijono, 2001, *Kebijaksanaan Upah dan Industrialisasi*, LPEM-FEUI, Jakarta.

Tjokrowinoto, Moeljarto. 1996. *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Todaro, P. Michael. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Ketujuh. Penerbit Erlangga, Jakarta.

Yustika, Erani A. 2002. *Pembangunan dan Krisis, Memetakan Perekonomian Indonesia*. Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.